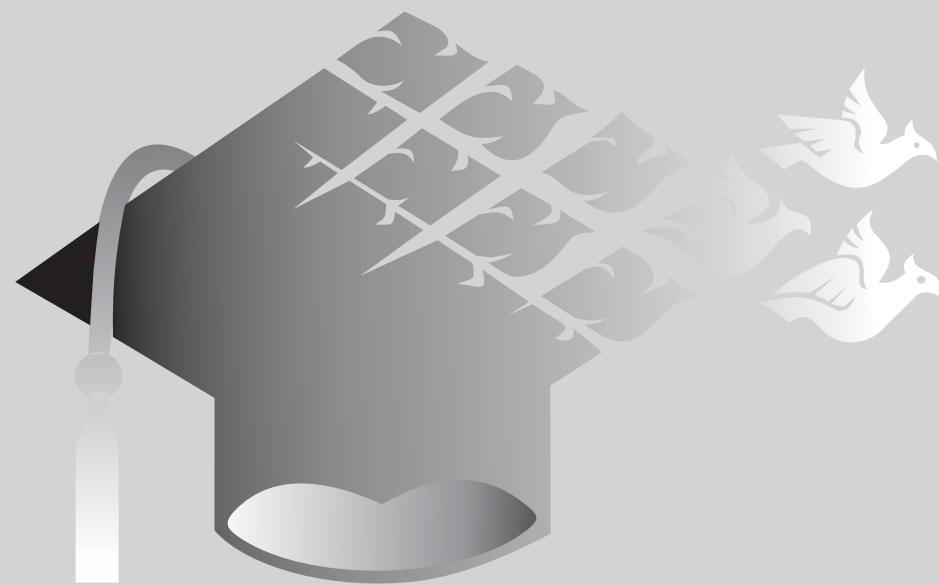


Strategi dan Kebijakan Jangka Panjang  
Pendidikan Tinggi 2003 - 2010  
Meningkatkan peran serta masyarakat

# Strategi dan Kebijakan Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003 - 2010

Meningkatkan peran serta masyarakat



**KATA PENGANTAR**

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menyusun Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi yang dikenal dengan HELTS 2003-2010 (*Higher Education Long Term Strategy*). Dokumen ini menjadi acuan utama dalam upaya meningkatkan peran pendidikan tinggi di Indonesia dalam konteks persaingan global sehingga mampu memperkuat daya saing bangsa.

Daya saing bangsa dapat ditingkatkan apabila kesehatan organisasi pendidikan tinggi baik di tingkat nasional maupun perguruan tinggi dapat diwujudkan. Agar dapat menjadi organisasi yang sehat, Ditjen Dikti perlu berubah peran dari regulator dan eksekutor, menjadi regulator, fasilitator, *enabler*, sementara perguruan tinggi perlu memiliki otonomi dalam mengelola masing-masing institusinya sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan, melakukan pembaharuan dalam proses perkembangan budaya bangsa, serta mampu memberikan layanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dokumen *HELTS* mencakup kerangka dasar pengembangan sistem dan manajemen pendidikan tinggi yang implementasinya memerlukan partisipasi dan dukungan dari semua unsur *stakeholders* seperti: pembuat kebijakan (pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif dan yudikatif), masyarakat perguruan tinggi (pimpinan, dosen, staf pendukung, mahasiswa), dan masyarakat umum (orangtua mahasiswa, sektor produktif, LSM, alumni, media masa serta *stakeholders* lainnya). Dalam upaya memudahkan semua unsur *stakeholders* untuk berpartisipasi diperlukan dokumen pendukung yang bisa menjabarkan secara lebih operasional yang disajikan dalam tiga buku dengan orientasi kepentingan masing-masing kelompok pengguna. Buku ini disiapkan khusus untuk masyarakat umum, sedang dua buku yang lain disiapkan untuk masyarakat perguruan tinggi dan para pembuat kebijakan.

Dalam upaya menghasilkan dokumen pendukung ini, Ditjen Dikti melakukan konsultasi dan penjangkaran pendapat melalui diskusi yang intensif, dengan melibatkan berbagai pihak dari pembuat kebijakan, kalangan perguruan tinggi, serta masyarakat pengguna dalam berbagai forum. Untuk itu, perkenankan saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan diterbitkannya dokumen ini. Kepada seluruh Tim Penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus.

Jakarta, April 2004

Satryo Soemantri Brodjonegoro  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan	v
Strategi Jangka Panjang <b>Pendidikan Tinggi 2003 - 2010</b> Informasi bagi masyarakat umum	1
Strategi Jangka Panjang <b>Pendidikan Tinggi 2003 - 2010</b> Informasi bagi pengguna lulusan	7
Strategi Jangka Panjang <b>Pendidikan Tinggi 2003 - 2010</b> Informasi bagi orang tua dan calon mahasiswa	25
Strategi Jangka Panjang <b>Pendidikan Tinggi 2003 - 2010</b> Informasi bagi pemerintah daerah	43
Strategi Jangka Panjang <b>Pendidikan Tinggi 2003 - 2010</b> Informasi bagi filantropis, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat	57

## Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Ringkasan Eksekutif

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar penting yang diharapkan dapat membawa perubahan suatu bangsa. Dunia pendidikan tinggi tidak hanya dapat menjadi sarana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi proses pembelajaran di kampus juga diharapkan dapat menjadi wahana yang sangat penting untuk merubah pola pikir masyarakat dalam menuju terwujudnya masyarakat sipil (civil society) yang demokratis. Namun demikian, timbul pertanyaan, apakah pendidikan tinggi di Indonesia sudah mampu menunjukkan jati diri yang sesungguhnya?

Dalam rangka persaingan global, kebijakan dalam bidang pendidikan tinggi harus dapat merespon berbagai tantangan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pada saat ini terlihat bahwa sebagian besar lulusan perguruan tinggi Indonesia masih belum mampu untuk bersaing mengisi lapangan kerja pada tingkat internasional. Sementara itu, berbagai perubahan mendasar dan sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan tinggi, yaitu krisis multi dimensi, perubahan rezim pemerintahan, dan trend global. Hal ini berakibat di satu pihak terjadi perubahan stratifikasi sosial yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan tinggi dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas, di lain pihak terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mendanai pendidikan tinggi.

Dalam dekade ini Indonesia menjalani masa transisi menuju masyarakat sipil yang lebih demokratis. Setelah mengalami masa krisis yang sangat berat, pemerintahan yang lebih demokratis telah terbentuk dan partisipasi masyarakat menjadi semakin penting. Seluruh tatanan kenegaraan mengalami masa transisi dalam rangka mencapai masyarakat demokratis yang berbasis kepada partisipasi publik. Untuk itu diperlukan suatu kekuatan moral yang mampu berperan sebagai penggerak dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral, perguruan tinggi harus senantiasa memperhatikan kualitasnya. Program pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas ditandai dengan kemampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan pengetahuan global. Pertanyaan yang timbul adalah apakah perguruan tinggi saat ini telah memiliki daya saing di tingkat global? Beberapa hasil pengamatan menunjukkan perguruan tinggi Indonesia belum memenuhi kondisi yang diharapkan. Hasil survei *Asiaweek* tahun 2000 hanya menempatkan perguruan tinggi

Indonesia pada posisi bawah. Bahkan, dari 100 universitas terbaik di Asia Pasifik yang dikompilasi oleh *the 'Shanghai Jiao Tong University's Institute of Higher Education'* (2003) ternyata tidak satupun yang masuk dari Indonesia.

#### Strategi nasional pendidikan tinggi

Untuk memperbaiki keadaan di atas, sangat diperlukan adanya strategi nasional untuk mengembangkan institusi pendidikan tinggi yang dapat dipercaya melalui restrukturisasi sistem secara nasional. Sistem dimaksud haruslah akuntabel terhadap publik, ditunjukkan dengan efisiensi yang tinggi, mutu dan relevansi keluaran, dan manajemen internal yang transparan serta memenuhi standar mutu yang berlaku. Sebagai kekuatan moral, perguruan tinggi harus mampu berkontribusi secara langsung untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, maka pendidikan tinggi menerapkan strategi baru yang dikenal dengan paradigma baru. Implementasi dari konsep tersebut mengandalkan pendanaan berdasarkan kinerja dan meningkatkan partisipasi pengguna dalam melakukan perencanaan secara transparan, demokratis, serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Perubahan struktural dalam konsep ini bukanlah tujuan karena tujuan sebenarnya adalah peningkatan kualitas keluaran dan manfaat pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pada awal tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional telah menerbitkan dokumen *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*. Dokumen ini menggantikan Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) 1996-2005 yang dianggap sudah tidak memadai lagi untuk diterapkan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi amat cepat sejak reformasi tahun 1998. Dalam HELTS 2003-2010, strategi pengembangan yang diambil bertumpu pada 3 strategi utama, yaitu peningkatan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*), otonomi dan desentralisasi (*autonomy*), dan kesehatan organisasi (*organizational health*).

#### Daya saing bangsa

Di tengah anggapan bahwa pendidikan tinggi belum mampu menyumbangkan lulusan yang dapat mengisi tenaga kerja berkualitas baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional, perguruan tinggi dituntut untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Untuk meningkatkan daya saing lulusan, haruslah dimulai dengan peningkatan daya saing perguruan tinggi itu sendiri. Pada tingkat nasional, upaya peningkatan daya saing institusi pendidikan tinggi telah dilakukan Ditjen Dikti sejak awal tahun 1990-an melalui kebijakan yang tertuang di dalam KPPTJP 1996-2005 dan dilanjutkan dengan HELTS 2003-2010. Melalui kebijakan tersebut, institusi

pendidikan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitasnya melalui berbagai program pengembangan, seperti program *University Research for Graduate Education (URGE, 1990)*, *Development of Undergraduate Education (DUE, 1994)*, *Quality for Undergraduate Education (QUE, 1996)*, *Semi-QUE (1999)*, *DUE-like (1999)*, *Technological and Professional Skills Development Project (TPSDP, 2000)*, serta Program A1, A2, dan B (2004). Khusus melalui Program B, diharapkan agar mulai muncul perguruan tinggi yang mampu menunjukkan kemampuannya untuk bersaing pada tingkat internasional.

#### Otonomi dan desentralisasi

Pembenahan kapasitas institusi juga dilakukan dengan pendelegasian kewenangan yang lebih besar kepada perguruan tinggi. Ditjen Dikti telah bergeser perannya dari regulator menjadi fasilitator. Melalui PP 61 tahun 1999, kewenangan perguruan tinggi makin diperluas melalui otonomi perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang otonom diharapkan akan memilih dan menetapkan fokus masing-masing yang dilandasi oleh potensi, kekhasan dan nilai-nilai institusi setempat, dengan tentu saja tetap memperhatikan nilai-nilai akademik universal serta tujuan pendidikan nasional.

#### Kesehatan organisasi

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka institusi pendidikan tinggi juga harus sehat. Kesehatan institusi pendidikan tinggi diartikan sebagai suatu keadaan dimana organisasi berfungsi secara optimal mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kesehatan organisasi ini akan secara sistematis dan terprogram dikembangkan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat perguruan tinggi. Pada tingkat pusat akan dilakukan pembenahan kelembagaan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas program-program pengembangan sektor pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, perguruan tinggi juga diharapkan meningkatkan kinerjanya dalam melayani stakeholders dan senantiasa berupaya menghasilkan lulusan yang berkualitas.

#### Peran serta masyarakat

Untuk mendukung pelaksanaan ketiga strategi tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengambil peran dalam mendukung pemerintah dan institusi penyelenggara pendidikan tinggi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Masyarakat dalam hal ini dibagi menjadi 4 (empat) kelompok besar yaitu: pengguna lulusan perguruan tinggi, orang tua dan calon mahasiswa, pemerintah daerah, serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat.

- Pengguna lulusan senantiasa melakukan penjangkaran tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak

hanya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni pada bidang tertentu, tetapi juga menguasai kemampuan dan ketrampilan pendukung (soft skills), yang mencakup antara lain: kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara verbal maupun melalui media tulisan, penguasaan bahasa asing (khususnya Bahasa Inggris), ketrampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan belajar dan berfikir logis analitis, serta kemampuan bekerja sama. Permasalahan rendahnya kemampuan lulusan perguruan tinggi makin ditambah dengan kondisi resesi di Indonesia yang menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi sehingga peluang pasar kerja juga belum begitu membaik. Sementara itu, pasar terbuka dan penetrasi pekerja asing mulai terasa sejak beberapa tahun terakhir ini. Pekerja asing yang sebelumnya hanya terdapat di wilayah sekitar Jakarta, saat ini mulai masuk ke pelosok negeri ini. Pekerja asing khususnya dari Philipina dan India telah banyak merambah di perusahaan multi nasional di Indonesia.

- Setiap tahun di Indonesia lebih dari satu juta lulusan pendidikan menengah yang ingin meneruskan ke pendidikan tinggi. Orang tua dan/atau calon mahasiswa pasti akan selalu berupaya untuk memilih jenis pendidikan tinggi atau perguruan tinggi tertentu yang dapat memberikan jaminan masa depan. Dengan ilmu yang didapat di perguruan tinggi, mereka berharap akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih kompetitif.
- Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pembangunan di daerah. Keterkaitan antara pendidikan tinggi dan pemerintah daerah tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, pendidikan tinggi dapat berperan menunjang upaya pemerintah daerah dalam pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah, terutama sektor-sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, tentunya dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pada sisi yang lain, pemerintah daerah dapat berperan menunjang pengembangan pendidikan tinggi, khususnya kegiatan perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat terlaksana apabila ada upaya nyata untuk mendorong kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Keberhasilan pembangunan daerah diberbagai sektor akan meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengatasi masalah-masalah nasional, dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional.
- Organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (termasuk individu dan media massa) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 54 ayat 1, menyebutkan

bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Kontrol yang positif dari berbagai komponen masyarakat tersebut diharapkan akan makin meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

#### **Pendanaan pendidikan tinggi**

Pendanaan pendidikan tinggi merupakan hal yang selalu menjadi perhatian publik. Masyarakat sering mempertanyakan mengapa biaya pendidikan tinggi harus mahal. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, pasti dibutuhkan biaya yang mahal. Yang harus menjadi kesepahaman bersama adalah bagaimana proporsi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pendanaan pendidikan tinggi di satu pihak merupakan kewajiban pemerintah sebagai perwujudan program peningkatan kecerdasan bangsa dan merupakan rangkaian program pendidikan secara keseluruhan yang telah dimulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di pihak lain, mengingat lulusan program pendidikan tinggi sangat penting artinya bagi pengembangan sektor swasta, maka sektor swasta juga berkewajiban dalam pendanaan pendidikan tinggi. Dari hasil perhitungan yang dilakukan Depdiknas tahun 2003, diperoleh gambaran bahwa idealnya besaran biaya pertahun per mahasiswa adalah sebesar Rp. 18.1 juta. Angka ini masih jauh dari kenyataan mengingat bahwa pada saat ini biaya tersebut baru mencapai angka rata-rata sekitar Rp. 6 juta. Dilihat dari kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan seperti yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003, maka anggaran pendidikan adalah 20 % dari APBN. Namun demikian, pada saat ini kemampuan pemerintah baru mencapai 4.95%, yang sebagian besar dialokasikan untuk sektor pendidikan dasar dan menengah. Tentu saja pendanaan pendidikan bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena dalam undang-undang disebutkan bahwa masyarakat juga bertanggung jawab memenuhi biaya pendidikan.

#### **Penutup**

Berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan hal yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum. Namun demikian, Ditjen Dikti beserta semua perguruan tinggi di Indonesia tidak akan mampu mengemban tugas ini tanpa adanya kerjasama positif dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, pengguna lulusan perguruan tinggi, orang tua dan calon mahasiswa, pemerintah daerah, serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat memberikan partisipasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Melalui buku ini diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemana arah dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia paling tidak sampai tahun 2010, serta bagaimana pihak-pihak tersebut dapat berpartisipasi secara proaktif. Melalui kesepahaman bersama tersebut, mudah-mudahan visi pendidikan tinggi 2010 seperti yang tercantum dalam HELTS 2003-2010 dapat kita capai.

Strategi Jangka Panjang

## Pendidikan Tinggi 2003 - 2010

Informasi Bagi Masyarakat Umum

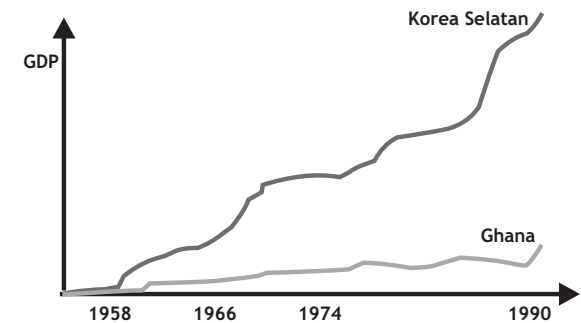


## Informasi Bagi Masyarakat Umum

### PENGANTAR

*Tiga strategi utama*  
 - *Peningkatan daya saing bangsa*  
 - *Desentralisasi*  
 - *Kesehatan Organisasi*

1. Pada awal tahun 2003, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional telah menerbitkan dokumen *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*. Dokumen ini menggantikan Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) 1996-2005 yang dianggap sudah tidak memadai lagi untuk diterapkan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi amat cepat sejak reformasi tahun 1998. Dalam HELTS strategi pengembangan yang diambil bertumpu pada 3 (tiga) strategi utama, yaitu daya saing bangsa (*nation's competitiveness*), otonomi dan desentralisasi (*autonomy*), dan kesehatan organisasi (*organizational health*).
2. Memasuki millennium ke-tiga, dunia memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan. Pada era ini pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan suatu bangsa amat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa tersebut menguasai ilmu pengetahuan. Perkembangan ini juga diikuti oleh makin kuatnya kecenderungan sistem terbuka yang menimbulkan persaingan global.



Sumber: Laporan Bank Dunia - 1999  
 Pertumbuhan GDP



3. Pendidikan tinggi berperan s ntral dalam peningkatan daya saing bangsa. Bank Dunia dalam salah satu laporannya tahun 1999 membandingkan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dan Ghana pada kurun waktu 1958 sampai dengan tahun 1990, secara meyakinkan menyimpulkan tingginya kontribusi sektor pendidikan tinggi dalam peningkatan daya saing bangsa. Keyakinan dan pemikiran inilah yang mendasari argumen bahwa pendidikan tinggi harus ditingkatkan kualitas dan relevansinya agar dapat lebih efektif berkontribusi kepada peningkatan *daya saing bangsa*.

4. Peran lain pendidikan tinggi yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan daya saing bangsa adalah dalam mencetak tenaga guru untuk pendidikan jenjang dasar dan menengah. Pemerintah berkeyakinan bahwa kualitas tenaga kependidikan harus secara sistematis dan terprogram ditingkatkan.

5. Secara universal dipahami bahwa agar menghasilkan kinerja lebih baik dan selanjutnya berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, perguruan tinggi harus memperoleh *otonomi* yang lebih luas. Otonomi dalam hal ini diartikan sebagai keleluasaan bagi institusi penyelenggara pendidikan tinggi untuk mengatur penyelenggaraan dan pengembangannya sendiri. Pemberian otonomi tentu saja harus pula diimbangi dengan akuntabilitas yang tinggi, sebagai bentuk tanggungjawab institusional kepada masyarakat.

6. Agar pengelolaan pendidikan tinggi - baik di tingkat pusat maupun di tingkat perguruan tinggi - berjalan sesuai harapan, diperlukan suatu organisasi yang sehat. Kesehatan organisasi ditandai oleh adanya *leadership* yang memiliki visi dan misi yang kuat serta mampu mendorong motivasi dan komitmen seluruh anggota organisasi untuk senantiasa berkembang dan menuju peningkatan. Organisasi tersebut memiliki struktur dan manajemen yang efektif dan efisien, serta memberikan wahana kerja yang kondusif bagi semua elemen dalam ogranisasi tersebut. Secara terprogram dan sistematis kapasitas tersebut harus dibina dan dikembangkan, sehingga mampu mencapai *kesehatan organisasi* yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan otonomi dan akuntabilitas.

*Peran strategis pendidikan tinggi dalam peningkatan daya saing bangsa*

*Otonomi mendorong terciptanya kesehatan organisasi*

*Kesehatan organisasi sebagai prasyarat peningkatan mutu*

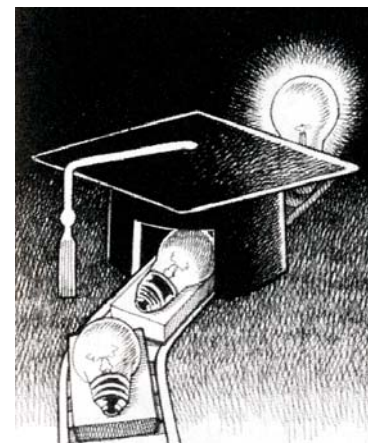
*Masyarakat memainkan peran sangat penting dalam pengembangan pendidikan tinggi*

7. Dalam upaya melaksanakan ketiga strategi tersebut di atas, masyarakat diharapkan mengambil peran dalam mendukung pemerintah dan institusi penyelenggara pendidikan tinggi sesuai dengan kapasitas masing-masng. Dokumen ini akan menjelaskan bagaimana masyarakat dapat berperan. Masyarakat umum dalam hal ini dibagi menjadi 4 (empat) kelompok besar yaitu: orang tua dan calon mahasiswa, pengguna lulusan perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat. Masing-masing kelompok sasaran pembaca dapat melihat bagian yang sesuai.

Strategi Jangka Panjang

## Pendidikan Tinggi 2003 - 2010

Informasi bagi pengguna lulusan





## Informasi bagi pengguna lulusan

### LATAR BELAKANG

*Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh berbagai jenis perguruan tinggi*

1. Program pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (perguruan tinggi negeri atau PTN) maupun oleh masyarakat (perguruan tinggi swasta atau PTS). Program pendidikan tinggi mencakup program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Berikut ini adalah data jumlah dan jenis perguruan tinggi di Indonesia (2003), di luar perguruan tinggi kedinasan dan agama.

No.	Jenis	PTN	PTS
1.	Politeknik	25	89
2.	Akademi	-	715
3.	Sekolah Tinggi	-	1043
4.	Institut	10	43
5.	Universitas	46	345
	<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>2235</b>

*Program akademik untuk pengembangan ilmu*

2. Program pendidikan akademik sesuai dengan namanya menitikberatkan pada penguasaan dan pengembangan pengetahuan pada suatu disiplin tertentu (sains, teknologi, atau seni). Program ini terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor. Program pendidikan akademik diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, atau universitas.

*Program vokasi untuk peningkatan ketrampilan*

3. Program pendidikan vokasi merupakan program yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ketrampilan tertentu. Program vokasi lebih dikenal masyarakat sebagai program diploma, yang meliputi jenjang Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV. Program pendidikan vokasi utamanya diselenggarakan oleh perguruan tinggi berbentuk akademi atau politeknik. Beberapa universitas dan institut juga menyelenggarakan program vokasi.



4. Seperti halnya program pendidikan vokasi, program pendidikan profesi juga menitikberatkan pada penguasaan ketrampilan pada suatu bidang profesi tertentu. Bedanya adalah bahwa program pendidikan profesi diikuti oleh mahasiswa yang telah menempuh pendidikan jenjang sarjana. Termasuk dalam program pendidikan profesi ini antara lain adalah program pendidikan dokter bagi sarjana kedokteran, pendidikan spesialis bagi para dokter, pendidikan notariat bagi sarjana hukum, dll. Program pendidikan profesi dilakukan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi.
5. Dokumen Strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi 2003 - 2010 menyetujui beberapa permasalahan pokok antara lain: **relevansi dan kualitas, soft skills, pembiayaan pendidikan tinggi, dan pengelolaan perguruan tinggi** yang sekilas diuraikan berikut ini.

*Program profesi untuk memasuki profesi tertentu*

#### Relevansi dan Kualitas

6. Kualitas lulusan pendidikan tinggi dinyatakan sebagai daya saing lulusan tersebut dalam memperoleh pengakuan dunia ilmu pengetahuan di tingkat internasional. Kualitas ini antara lain ditandai dengan kemampuan untuk menembus publikasi di jurnal internasional, kemampuan lulusan untuk bersaing di arena global, dan kemampuan untuk memenangkan penghargaan akademik di tingkat internasional seperti hadiah Nobel, dan lain-lain.
7. Relevansi, di pihak lain mengukur tingkat kesesuaian antara produk yang dihasilkan pendidikan tinggi (baik berupa lulusan maupun hasil-hasil penelitian maupun pengembangan) dengan kebutuhan pihak-pihak pengguna produk tersebut antara lain pemerintah, masyarakat, dan industri.
8. Program pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas ditandai dengan kemampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan pengetahuan global.

*Hanya pendidikan yang relevan dan berkualitas yang akan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa*

*Perlu juga pengembangan ketrampilan hidup*

*Pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat*

*Perguruan tinggi perlu menerapkan manajemen yang baik (good corporate governance)*

#### KONDISI PENDIDIKAN TINGGI SAAT INI

*Tingginya angka pengangguran cerminan rendahnya mutu pendidikan*

#### Soft Skills

9. Lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni pada bidang tertentu, tetapi juga menguasai ketrampilan tambahan seperti, kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan berfikir logis, kemampuan belajar, dan lain-lain. Kemampuan-kemampuan tambahan ini disebut *soft skills*.

#### Pembiayaan Pendidikan Tinggi

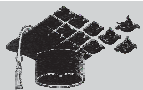
10. Pembiayaan pendidikan tinggi di satu pihak merupakan kewajiban pemerintah sebagai perwujudan program peningkatan kecerdasan bangsa dan merupakan rangkaian program pendidikan secara keseluruhan yang telah dimulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di pihak lain, mengingat lulusan program pendidikan tinggi sangat penting artinya bagi pengembangan sektor produktif, maka sektor swasta juga berkewajiban dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

#### Manajemen Perguruan Tinggi

11. Perguruan tinggi merupakan institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi ditentukan oleh sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan tersebut serta sistem aturan yang mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan. Sistem organisasi dan manajemen ini secara umum diatur oleh pemerintah, seperti struktur utama organisasi, mekanisme pengangkatan pimpinan, tugas dan fungsi organ-organ utama organisasi perguruan tinggi.

#### Relevansi dan kualitas pendidikan tinggi

12. Pada saat ini sektor pendidikan tinggi mengakomodasi sekitar 3.5 juta mahasiswa dan meluluskan sekitar 600 ribu lulusan dari berbagai jenjang per tahun, sebagian besar (> 90%) diantaranya adalah pada program pendidikan akademik jenjang sarjana dan program pendidikan vokasi (diploma). Beberapa dari lulusan ini telah mampu merebut pasar kerja baik dalam maupun luar negeri. Di samping itu, juga terdapat lulusan-lulusan yang mampu melakukan studi lanjut pada berbagai perguruan tinggi ternama di luar negeri. Namun demikian, secara umum kualitas lulusan pada sektor ini belum memadai. Hal ini dapat dilihat misalnya dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan



bahwa angka pengangguran terbuka untuk lulusan perguruan tinggi (diploma dan sarjana) pada tahun 2001 mencapai 541 ribu orang. Sementara itu terjadi keadaan dimana pihak pencari tenaga kerja mengeluhkan sulitnya mencari tenaga kerja dengan kualifikasi dan kompetensi yang mereka inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara jumlah telah terjadi produksi lulusan yang berlembah namun dari segi kualitas masih terjadi kekurangan.

**Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan**

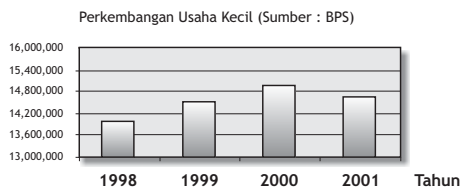
Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
≤ SD	1.246	1499	2.745
SMTp	922	864	1.786
SLTA	1.612	1.321	2.933
Diploma	106	146	252
Sarjana	146	143	289
<b>Jumlah</b>	<b>4.032</b>	<b>3.973</b>	<b>8.005</b>

Sumber: BPS (Angka diatas dalam ribuan), 2001

12

13. Kemampuan lulusan program pendidikan tinggi untuk menciptakan lapangan kerja juga secara umum belum terlalu menggembirakan. Kalaupun bukan satu-satunya indikator, lambannya pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah dari tahun ke tahun dapat dijadikan indikasi lemahnya kemampuan kewirausahaan para lulusan perguruan tinggi.

*Jiwa kewirausahaan para lulusan dinilai juga rendah*



14. Rendahnya tingkat keterserapan lulusan perguruan tinggi dalam pasar kerja juga diakibatkan oleh rendahnya relevansi antara bidang keilmuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh lulusan tersebut dengan kebutuhan dunia usaha dan pembangunan nasional.

*Relevansi dengan kebutuhan pasar kerja juga kurang*

*Rendahnya kualitas dan relevansi hasil penelitian*

**Ilustrasi PT Badak NGL Kalimantan**

PT Badak NGL merupakan perusahaan gas alam cair yang cukup besar dengan struktur ketenagaan yang cukup kompleks. Salah satu jenis pekerjaan yang dibutuhkan adalah tenaga teknis penunjang dengan kualifikasi lulusan Sekolah Menengah. Setiap kali melakukan penerimaan pegawai untuk kelompok ini maka sebagian besar pelamar adalah lulusan perguruan tinggi. Informasi lebih jauh menunjukkan bahwa latar belakang bidang keilmuan yang dimiliki tidak sesuai dengan bidang pekerjaan untuk kelompok pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lulusan perguruan tinggi.

*Kecakapan hidup juga rendah*

15. Secara keseluruhan, kelemahan lulusan perguruan tinggi bukan hanya dalam hal lemahnya penguasaan kompetensi, ketrampilan, dan relevansinya dengan kebutuhan pembangunan nasional, melainkan juga memiliki kelemahan dalam hal kemampuan dan ketrampilan pendukung (*soft skills*), yang mencakup antara lain :

- kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara verbal maupun melalui media tulisan
- penguasaan bahasa asing (khususnya Bahasa Inggris)
- ketrampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
- kemampuan belajar dan berfikir logis analitis
- kemampuan bekerja sama

13

**Ilustrasi PT Caltex - Indonesia**

PT Caltex-Indonesia pada suatu kesempatan merekrut beberapa pegawai baru dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sebagian dari mereka merupakan lulusan pendidikan tinggi dari negara maju. Perekrutan dilakukan dengan menggunakan sistem dan materi ujian seleksi yang sama. Sehingga secara kompetensi akademik maupun ketrampilan semua pegawai yang diterima dianggap memiliki kemampuan dan potensi yang kurang lebih setara.

Sebagai suatu perusahaan multi nasional, PT Caltex memiliki jaringan yang sangat luas dan global. Jaringan tersebut dapat diakses oleh setiap pegawai yang bekerja di Caltex. Dalam selang beberapa bulan, pegawai dengan latar belakang pendidikan luar negeri menunjukkan kemajuan yang lebih pesat dibandingkan dengan mereka yang lulusan perguruan tinggi dalam negeri. Perbedaan tersebut utamanya disebabkan oleh kekurangmampuan lulusan dalam negeri dalam memanfaatkan jaringan global yang dimiliki oleh Caltex sebagai sumber informasi dan pengetahuan.

16. Kualitas hasil penelitian juga secara umum belum menggembirakan dan memiliki tingkat relevansi yang rendah dengan kepentingan pembangunan nasional.



**Persaingan Global**

17. Pasar terbuka dan penetrasi pekerja asing mulai terasa sejak beberapa tahun terakhir ini. Pekerja asing yang sebelumnya hanya terdapat di wilayah sekitar Jakarta, saat ini mulai masuk ke pelosok negeri ini. Pekerja asing khususnya dari Philipina dan India telah banyak merambah di perusahaan multi nasional di Indonesia.

*Penetrasi pekerja asing perlu diantisipasi*

18. Seperti dijelaskan sebelumnya, meskipun lulusan beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah mampu menembus pasar kerja di luar negeri, kemampuan bersaing lulusan perguruan tinggi di Indonesia untuk merebut peluang-peluang pekerjaan di luar negeri pada umumnya masih rendah. Kemampuan bahasa Inggris merupakan salah satu kendala utama. Kendala lainnya adalah sertifikasi. Program pendidikan vokasi dan profesi di Indonesia umumnya tidak dilengkapi dengan pemberian sertifikat kecakapan profesi yang diakui secara internasional.

*Perguruan tinggi di Indonesia belum dapat bersaing di arena global*

19. Peringkat perguruan tinggi Indonesia umumnya menduduki peringkat jauh di bawah perguruan tinggi lain di Asia. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei *Asiaweek* tahun 2000 yang menempatkan perguruan tinggi Indonesia pada posisi bawah. Dua universitas besar yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada berturut-turut menempati posisi 63 dan 68 dari 77 perguruan tinggi di Asia. Bahkan, dari 100 universitas terbaik di Asia Pasifik yang dikompilasi oleh the *'Shanghai Jiao Tong University's Institute of Higher Education'* tidak satupun yang masuk dari Indonesia. Lima kriteria yang digunakan untuk kompilasi ini: 1) pemenang Nobel (fisika, kimia, kedokteran dan ekonomi), 2) peneliti yang sering dikutip dalam 21 subjek bidang keahlian, 3) artikel dalam *Nature* dan *Science*, 4) *Citation index*, dan 5) kinerja masing-masing staf akademik.

**Pembiayaan Pendidikan Tinggi**

20. Seperti telah diuraikan sebelumnya, sektor pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah (PTN) dan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (PTS). Perguruan tinggi negeri, meskipun menarik uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dari mahasiswa, sebagian besar sumber pendanaannya masih berasal dari pemerintah, baik berupa

*Secara keseluruhan pendidikan tinggi masih kekurangan biaya*

anggaran untuk pembangunan maupun untuk kebutuhan rutin seperti gaji pegawai dan biaya operasional. Secara rata-rata peserta didik hanya menanggung kurang dari 30% dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah.

21. Pada tahun 2003, DEPDIKNAS telah melakukan penghitungan rata-rata biaya pendidikan yang dibutuhkan pada setiap jenjang pendidikan. Untuk SD, SLTP, dan SLTA, besaran biayanya pertahun persiswa adalah masing-masing Rp 750 ribu, Rp 1,5 juta, dan Rp 2 juta. Untuk perguruan tinggi adalah sebesar Rp 18.1 juta. Besarnya biaya pendidikan, terutama untuk perguruan tinggi merupakan suatu dilema mengingat rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah [Bank Dunia: jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 yang memiliki penghasilan rata-rata kurang dari US\$ 2.00 per hari mencapai 55%]. Sementara itu, jumlah dana yang disiapkan oleh pemerintah pada sektor pendidikan seperti diuraikan sebelumnya masih sangat minim.

**Ilustrasi Struktur Pendanaan PTN**

Pendanaan PTN bersumber dari 3 (tiga) komponen besar yaitu: anggaran pembangunan (DIP), anggaran rutin (DIP), yang keduanya berasal dari pemerintah, dan dana masyarakat khususnya SPP. Besarnya masing-masing komponen untuk tahun 2000-2003 terdapat pada tabel di bawah ini:

	2000	2001	2002	2003
Dana Pembangunan	986,817,133	1,410,851,880	1,889,403,806	2,130,960,812
Dana Rutin	1,192,197,115	1,978,421,882	2,407,810,991	2,788,828,029
SPP	752,674,756	770,451,921	1,168,604,184	1,444,341,279
Pendapatan Lainnya	61,027,683	62,678,425	233,880,484	318,206,506

Catatan: Pendapatan lainnya mencakup pendapatan dari kontrak kerja dan layanan yang dilakukan perguruan tinggi. Angka di atas dalam ribuan.

22. Meskipun amandemen Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan (di luar gaji dan pendidikan kedinasan), namun pada kenyataannya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan masih sekitar 4% jauh dari target 20%. Hal ini secara keseluruhan menunjukkan betapa pendidikan tinggi, khususnya yang diselenggarakan oleh pemerintah sangat kekurangan biaya. Hal ini jualan yang banyak dijadikan pembenaran atas rendahnya kualitas lulusan perguruan tinggi saat ini.



	2000	2001	2002	2003
APBN [Milyar]	223,227	359,743	351,724	336,155
Sektor Pendidikan [Milyar]	9,500	11,600	14,785	14,138
Pendidikan/APBN	4.26%	3.22%	4.20%	4.95%
Pendidikan Tinggi	2,179	3,389	4,297	4,919
Pendidikan Tinggi/APBN	0.98%	0.94%	1,22%	1.46%

23. Pada perguruan tinggi swasta sebagian besar (lebih dari 90%) pendanaannya berasal dari SPP atau sumbangan lainnya yang dibayar oleh mahasiswa. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan keuangan suatu perguruan tinggi swasta akan sangat bergantung pada kemampuan membayar yang dimiliki oleh mahasiswa dan tentu saja banyaknya mahasiswa yang dimiliki. Alasan terakhir ini menyebabkan jumlah mahasiswa yang diterima di beberapa perguruan tinggi swasta relatif jauh lebih besar.

**Kemitraan antara Perguruan Tinggi dan Sektor Industri**

24. Meskipun di beberapa perguruan tinggi kerjasama dengan sektor industri telah berkembang cukup menggembirakan, secara umum kemitraan ini belum dikembangkan dengan optimum. Mengingat sektor industri merupakan pihak yang sangat berkepentingan dengan pihak perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sebagai penyedia sumber daya manusia terdidik yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha, maka seyogyanya kemitraan tersebut akan saling menguntungkan kedua belah pihak.

25. Salah satu alasan atas rendahnya kerjasama yang sering diungkapkan pihak industri adalah kurangnya kesiapan pihak perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan mereka. Sebaliknya pihak perguruan tinggi merasa bahwa sektor industri di Indonesia umumnya masih belum memerlukan layanan dengan tingkat kecanggihan yang membutuhkan penangan perguruan tinggi.

**Ilustrasi Lippo Group**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, LIPPO group sangat memandang perlu untuk menyediakan sebanyak mungkin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bagi nasabahnya. Secara teknologi ATM sebenarnya cukup mudah untuk dirancang bangun. Atas dasar pemikiran ini, Lippo menajaki kemungkinan perakitan ATM dalam negeri dengan melibatkan

*Secara umum kemitraan antara perguruan tinggi dengan sektor industri belum optimal*

*Saat ini ada 3 bentuk perguruan tinggi yaitu PTN, PT-BHMN, dan PTS*

*PTN merupakan bagian dari unit birokrasi pemerintah*

*PT-BHMN merupakan badan hukum yang otonom*

*PTS diselenggarakan oleh yayasan*

perguruan tinggi.

Setelah mencoba menawarkan ide tersebut ke beberapa perguruan tinggi yang dipandang mampu untuk melakukan tugas tersebut, ternyata tidak satupun perguruan tinggi dalam negeri yang dapat memenuhi permintaan pihak Lippo.

**Pengelolaan Perguruan Tinggi**

26. Pada saat ini di Indonesia dikenal tiga model organisasi perguruan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) dan Perguruan Tinggi Swasta. Pada PTN dan PTS diterapkan struktur organisasi yang seragam, mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 (PP 60).

27. Pada PTN, pimpinan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pegawai yang bekerja di perguruan tinggi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang penggajian, proses pengangkatan, promosi, dan pemberhentiannya tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan perguruan tinggi. Akibatnya, kondisi perguruan tinggi secara organisasi umumnya kurang sehat, yang ditandai dengan rendahnya efisiensi, kemajuan institusi lamban, dan budaya kualitas tidak tumbuh.

28. Pada tahun 2000 sebanyak empat PTN diubah statusnya menjadi BHMN, yaitu UI, UGM, ITB, dan ITB. Kemudian pada tahun 2003, USU dan kemudian disusul oleh UPI pada awal tahun 2004 juga berubah status menjadi BHMN. Sebagai BHMN perguruan tinggi bersifat otonom termasuk dalam pengelolaan organisasi, sumber daya dan kegiatan akademik. Masing-masing PT-BHMN memiliki organ tertinggi yang dinamakan Majelis Wali Amanat (MWA), yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengangkat dan memberhentikan pimpinan serta menyetujui anggaran perguruan tinggi.

29. Pada PTS meskipun secara struktur internal juga mengikuti aturan yang ditetapkan PP 60, namun pengendalian manajemen dipegang oleh Yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi. Dari sisi kegiatan akademik pengendalian tetap dipegang pemerintah, misalnya dalam hal pendirian fakultas, jurusan, atau dalam hal pembukaan program studi.





## KEADAAN YANG DIHARAPKAN

30. Masih sejalan dengan prinsip-prinsip Paradigma Baru, Strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010 menformulasikan visi pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2010 sebagai suatu sistem pendidikan tinggi yang: 1) berkualitas tinggi; 2) menjamin akses bagi semua calon peserta didik yang memenuhi persyaratan mutu akademik; dan 3) memiliki otonomi yang dapat menjamin terselenggaranya kegiatan akademik yang efisien dan berkualitas. Untuk mewujudkan visi ini, pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia akan diarahkan pada 3 (tiga) isu utama, yakni **peningkatan daya saing bangsa, otonomi pengelolaan pendidikan tinggi, dan peningkatan kesehatan organisasi penyelenggara pendidikan tinggi.**

### Kualitas dan Relevansi Pendidikan Tinggi

31. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sasaran utama penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia adalah peningkatan daya saing bangsa. Agar pendidikan tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa maka perlu dipenuhi kondisi berikut:

- Pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan luaran (termasuk hasil-hasil penelitian dan lulusan) yang kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pendidikan tinggi harus mendidik mahasiswanya agar mampu memilih dan mengadopsi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk selanjutnya diterapkan untuk mendukung pembangunan nasional.
- Aktifitas pendidikan tinggi dituntut untuk selalu relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi baik dalam konteks lokal maupun global. Dengan prinsip seperti ini, pendidikan tinggi akan memiliki kontribusi terhadap: a) penciptaan ilmu dan teknologi baru, b) penurunan ketergantungan terhadap tenaga ahli dari luar negeri, c) pengembangan kapasitas untuk mengeksplorasi sumberdaya alam secara berkelanjutan, d) pengembangan teknologi untuk kebutuhan industri lokal dan nasional, e) penurunan ketergantungan terhadap produk impor melalui pengembangan produk-produk substitusi impor, dan f) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Arah pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia*

*Pendidikan tinggi diharapkan dapat secara nyata berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa*

*Perguruan tinggi membangun budaya kualitas secara terprogram dan sistemik*

*Metode pembelajaran akan berorientasi pada mahasiswa*

*Membangun suasana akademik yang kondusif, menjalin kerjasama yang harmonis dengan stakeholders*

*Memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan pendidikan berkelanjutan*

- Pendidikan tinggi juga harus mampu membentuk lulusan yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat sebagai wujud dari warga negara yang bertanggung jawab.
32. Sejalan dengan isu ini, perguruan tinggi di Indonesia diharapkan untuk menempatkan kualitas sebagai prioritas daripada kuantitas alumninya. Ditjen Dikti bersama-sama dengan organisasi sejawat (*peers organization*) akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas dan kinerja institusi pendidikan tinggi. Sistem pembelajaran yang diterapkan oleh masing-masing institusi harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengetahuan mahasiswa yang didukung dengan metode yang fleksibel. Pada sisi lain, peningkatan kuantitas hanya akan dapat ditolerir jika terdapat kejelasan permintaan dari pasar kerja.
33. Metode pembelajaran yang diterapkan akan dapat membangun dan mendorong kreativitas dan inisiatif mahasiswa disamping kompetensinya. Perguruan tinggi diharapkan akan membangun sistem pembelajaran yang memungkinkan alumninya memiliki kemampuan untuk belajar lebih daripada sekadar keahlian yang dimilikinya. Sistem ini harus mampu mengkombinasikan materi pembelajaran yang memuat kompetensi utama dengan materi-materi yang terkait dengan *soft skills* termasuk didalamnya kemahiran berkomunikasi.
34. Untuk menjaga relevansi, Ditjen Dikti akan selalu memfasilitasi terciptanya hubungan yang baik antara mahasiswa, staf pengajar, dan masyarakat profesional terkait. Diharapkan mahasiswa dan staf perguruan tinggi dapat mengambil manfaat dari program-program pelatihan yang terdapat pada industri terutama untuk hal-hal yang terkait dengan kecakapan hidup tadi. Bahkan lebih jauh lagi, dengan menempatkan masyarakat industri sebagai mitra dalam pelaksanaan pendidikan tinggi, relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dan dunia kerja pada umumnya akan semakin tinggi.
35. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan dunia industri akan peningkatan dan penyegaran pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja mereka, perguruan tinggi akan menyelenggarakan berbagai program pendidikan/pelatihan termasuk Program Pendidikan Berkelanjutan (*continuing education program*) baik bergelar maupun non-gelar dengan





Modal pembelajaran yang fleksibel seperti pendidikan jarak jauh, pendidikan paruh waktu, dan pengumpulan kredit.

36. Institusi pendidikan tinggi juga diharapkan akan membangun semangat bersaing sekaligus kerjasama yang konstruktif dengan institusi lain baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama semacam ini diharapkan memungkinkan terjadinya penggunaan secara bersama fasilitas, keterampilan dan keahlian dari masing-masing institusi yang terlibat untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar maupun
37. Disamping itu, kerjasama antar unit kerja dalam suatu institusi akan selalu didorong sehingga isolasi-isolasi disiplin keilmuan baik dalam pengajaran maupun penelitian dapat diperkecil. Hal ini penting, mengingat kecenderungan pemecahan masalah saat ini yang menghendaki lintas disiplin bidang keilmuan. Berbagai bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain: membangun program studi lintas fakultas, menyajikan mata kuliah lintas departemen atau fakultas, ataupun kerjasama penelitian antar departemen untuk tugas akhir mahasiswa.

#### Pembiayaan Pendidikan Tinggi

38. Sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembiayaan sektor pendidikan termasuk pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka menegakkan transparansi dan akuntabilitas, pendidikan tinggi akan menerapkan sistem pembiayaan yang rasional dengan satuan biaya yang jelas serta kejelasan peran dan tanggungjawab masing-masing pihak yang berkepentingan.
39. Salah satu wujud penerapan paradigma ini adalah pendanaan untuk pengembangan institusi pendidikan tinggi yang sebelumnya lebih bernuansa alokasi berangsur-angsur diubah ke pola kompetisi. Program-program yang akan didanai pada pola ini harus berdasarkan hasil evaluasi mendalam dari keadaan diri institusi yang bersangkutan. Sistem akuntabilitasnya pun berubah dari sekedar pertanggungjawaban legal formal keuangan menjadi pertanggungjawaban kinerja. Sampai saat ini, jumlah dana pembangunan yang dikompetisikan oleh Ditjen Dikti untuk seluruh pendidikan tinggi negeri dan swasta telah mencapai sekitar 25% dan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

*Membangun budaya bersaing dan bekerjasama demi meningkatkan*

*Proses pembelajaran yang memungkinkan lintas disiplin dan bidang keilmuan*

*Pembiayaan yang rasional dengan satuan biaya yang jelas*

*Sektor produktif berperan aktif dalam mendukung pendanaan pendidikan tinggi*

*Bentuk-bentuk kerjasama yang diharapkan dari dunia usaha dan industri*

40. Mengingat berbagai keterbatasan baik pada sisi pemerintah maupun masyarakat secara umum, sektor produktif diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Salah satu wujud kemitraan ini adalah kesediaan sektor ini untuk berkontribusi dalam hal pendanaan dan pemberian akses bagi peserta didik terhadap fasilitas pembelajaran yang dimilikinya, misalnya laboratorium industri. Sebaliknya, sebagai bentuk akuntabilitas institusi pendidikan tinggi, Ditjen Dikti akan secara berkala menginformasikan kepada masyarakat tentang kinerja perguruan tinggi secara nasional.

41. Secara spesifik, bentuk kerjasama yang diharapkan dari sektor produktif antara lain adalah:

- Penyediaan dukungan finansial bagi mahasiswa berprestasi namun berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, baik berupa beasiswa dengan atau tanpa ikatan, maupun berupa pinjaman lunak. Dana beasiswa atau pinjaman semacam ini dapat dikelola langsung oleh pihak pemberi sumbangan atau dapat juga diserahkan ke Ditjen Dikti atau perguruan tinggi untuk mengelolanya.
- Penyediaan dana untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian khususnya penelitian terapan hasilnya akan secara langsung bermanfaat bagi sektor produktif. Penyediaan dana semacam ini dapat dikelola secara bersama dengan pemerintah atau secara langsung diserahkan kepada perguruan tinggi terkait.
- Penyediaan akses terhadap fasilitas, wahana kerja, serta bentuk sumber daya lain sebagai sarana dan prasarana pembelajaran, antara lain untuk kegiatan magang bagi mahasiswa ataupun *sabbatical* bagi staf pengajar. Kegiatan ini akan sangat bermanfaat disamping terhadap peningkatan kemampuan kerja praktek mahasiswa maupun staf juga sekaligus akan memperbaiki relevansi dan wawasan mereka tentang kondisi riil dunia kerja.
- Sektor produktif juga dapat mengembangkan perguruan tinggi dengan fokus bidang yang sesuai dengan keinginan pengembang dan memiliki kejelasan permintaan dari pasar kerja, dengan tetap mengacu kepada ketentuan umum pengembangan perguruan tinggi yang berlaku.



42. Disamping kerjasama-kerjasama di atas, perguruan tinggi juga diharapkan untuk mengeksplorasi peluang-peluang donasi dari masyarakat ataupun bentuk-bentuk usaha (*venture*) yang dapat menghasilkan dana. Namun demikian, seperti halnya dengan bentuk-bentuk kerjasama, peluang-peluang ini hanya akan dapat diterima sepanjang tidak mengorbankan nilai dan norma-norma akademik. Untuk itu institusi pendidikan tinggi akan dilengkapi dengan sistem pengawasan internal yang dapat memantau dan membuat pelaporan tentang efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan yang berjalan.

*Perguruan tinggi diharapkan mengembangkan usaha dan meningkatkan efisiensi*

43. Untuk menjamin bahwa pendanaan yang dialokasikan ke perguruan tinggi efisien dan efektif, pemerintah akan secara sistematis menerapkan penganggaran yang berbasis kinerja. Pola penganggaran ini telah didesain untuk memenuhi tuntutan-tuntutan pertanggung-jawaban publik seperti diuraikan sebelumnya. Agar target kinerja dapat tercapai, institusi pendidikan tinggi harus dapat mensinkronkan dan

*Dana pemerintah diberikan pada perguruan tinggi yang dapat menunjukkan kinerja yang baik*

**Pengelolaan Pendidikan Tinggi**

44. Sejalan dengan Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang menghendaki agar seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia menempatkan kualitas berkelanjutan sebagai prioritas, pengelolaan sektor pendidikan tinggi pada masa mendatang akan menengahkan dua strategi dasar yaitu otonomi dan kesehatan ogranisasi.

*Dari Paradigma Baru menuju otonomi dan kesehatan organisasi*

45. Untuk mewujudkan otonomi pengelolaan perguruan tinggi, strategi berikut akan diimplementasikan:

*Peran institusi pendidikan tinggi yang otonom*

- Secara bertahap sebagian kewenangan Ditjen Dikti akan didelegasikan kepada perguruan tinggi. Ditjen Dikti akan berperan lebih sebagai penentu kebijakan nasional pendidikan tinggi (baik dalam bentuk regulasi maupun pendanaan), misalnya dalam hal penyediaan infrastruktur hukum dan perundangan, arah pengembangan, persyaratan normatif pengelolaan. Tentu saja dalam batas-batas tertentu, pemerintah masih tetap berwenang untuk menerapkan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan dalam rangka melindungi masyarakat dari praktek yang merugikan.
- Sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, secara bertahap semua institusi pendidikan tinggi akan diubah statusnya menjadi Badan Hukum Pendidikan. Sebagai suatu badan hukum, perguruan tinggi akan merupakan entitas yang otonom, menerapkan sistem *governance* dan

*Perguruan tinggi yg otonom harus tetap menjaga nilai-nilai akademik*

Struktur organisasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan budaya akademik universal serta kondisi lokal masing-masing perguruan tinggi.

46. Perguruan tinggi yang otonom diharapkan akan memilih dan menetapkan fokus masing-masing yang dilandasi oleh potensi, kekhasan dan nilai-nilai institusi setempat, dengan tentu saja tetap memperhatikan nilai-nilai akademik universal serta tujuan pendidikan nasional. Pilihan dimaksud antara lain mencakup penentuan darma akademik yang ditekankan serta bidang-bidang keilmuan yang akan dikembangkan baik terkait dengan kegiatan penelitian maupun pengajaran.

47. Didalam perspektif otonomi ini, institusi pendidikan tinggi tetap akan dituntut untuk akuntabel termasuk dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya untuk menjamin akses bagi semua kalangan masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan mutu akademik.

*Atribut organisasi yang sehat pada perguruan tinggi*

48. Kesehatan organisasi institusi pendidikan tinggi diartikan sebagai suatu keadaan dimana organisasi berfungsi secara optimal mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkannya, dan dicirikan oleh karakteristik berikut:

- berkembangnya kebebasan akademik;
- terciptanya suasana akademik yang mendorong proses penelitian, inovasi, kreativitas dan pemunculan ide-ide bagi setiap individu;
- berkembangnya sistem nilai, norma, tata tertib dan operasi standar lainnya yang memungkinkan terjadinya *team building* dan *team spirit*, sehingga memungkinkan seseorang atau kelompok untuk produktif secara maksimal;
- berlakunya prinsip meritokrasi dengan baik sehingga setiap individu akan termotivasi untuk bekerja keras dan meraih keunggulan;
- berkembangnya kemampuan memasarkan dan menjual ide-ide yang berkembang dari kegiatan penelitian;
- berkembangnya kemampuan untuk menjalin kerjasama yang berkelanjutan di dalam maupun diluar perguruan tinggi;
- terlaksananya akuntabilitas keuangan.

49. Kesehatan organisasi ini akan secara sistematis dan terprogram dikembangkan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat perguruan tinggi. Pada tingkat pusat akan dilakukan pembenahan kelembagaan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas program-program pengembangan sektor pendidikan



tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan memposisikan dirinya sebagai fasilitator bagi terselenggaranya sistem pendidikan tinggi yang efektif dan efisien.

50. Pada tingkat perguruan tinggi, pengembangan institusi akan didasari oleh suatu rencana strategis yang dibangun berdasarkan hasil evaluasi diri yang seksama. Pengembangan rencana strategis tersebut didukung oleh komitmen yang kuat dari pimpinan serta melibatkan seluruh *stakeholders* internal maupun eksternal. Rencana strategis tersebut akan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan akan menjadi acuan pengelola institusi pada semua tingkat organisasi.

*Pentingnya perencanaan pada suatu institusi perguruan tinggi*

51. Juga disadari bahwa keberadaan sistem akuntansi dan audit internal sangat fundamental untuk mendukung terciptanya manajemen yang baik untuk organisasi yang sehat. Sistem ini akan memungkinkan terbentuknya uraian kerja yang jelas bagi pengelola institusi pendidikan tinggi sehingga terdapat kejelasan uraian tanggung jawab, tujuan, dan keselarasan biaya dan target output. Hal ini menjadi sangat penting untuk memudahkan pertanggungjawaban terhadap publik (*public accountability*).

*Pentingnya sistem audit internal untuk akuntabilitas manajemen perguruan tinggi*

52. Ditjen Dikti menyadari bahwa untuk mewujudkan otonomi dan kesehatan organisasi, peningkatan kapasitas diri masing-masing institusi pendidikan sangat penting oleh karena itu semua pihak yang berkepentingan harus turut membantu membangun kapasitas ini. Paling tidak Ditjen Dikti bersama-sama dengan Dewan Pendidikan Tinggi dan lembaga akreditasi akan memfasilitasi terbangunnya kapasitas tersebut. Salah satu program yang telah dan akan dijalankan adalah program pembimbingan (*nurturing*) bagi institusi yang sangat lemah.

*Perlunya program-program pembimbingan bagi perguruan tinggi yang kapasitasnya masih lemah*

53. Jika otonomi pengelolaan perguruan tinggi dengan organisasinya yang sehat terwujud dan sektor dunia usaha dan industri turut berperan serta, maka dapat diyakini bahwa perguruan tinggi di Indonesia akan: a) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan *soft-skills* yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja, mampu menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan pengetahuan global; b) menghasilkan lulusan yang kompetitif baik pada tingkat nasional maupun internasional; c) mampu menduduki peringkat terhormat diantara jajaran perguruan tinggi ternama di Asia maupun pada tingkat dunia.

*Harapan terhadap perguruan tinggi dimasa depan dengan adanya kontribusi dari sektor dunia usaha dan industri*



Strategi Jangka Panjang

## Pendidikan Tinggi 2003 - 2010

Informasi bagi orang tua dan calon mahasiswa





## Informasi bagi orang tua dan calon mahasiswa

### LATAR BELAKANG

*Perguruan tinggi dituntut menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, memiliki keunggulan, dan mampu bersaing di pasar global*

1. Setiap tahun di Indonesia lebih dari satu juta lulusan pendidikan menengah yang ingin meneruskan ke pendidikan tinggi. Dengan ilmu yang didapat di perguruan tinggi, mereka berharap akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih kompetitif. Pada sisi lain, arus perubahan global dan kemajuan teknologi yang semakin cepat menuntut perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, memiliki keunggulan, dan mampu bersaing di pasar global. Untuk itu, kebijakan pengembangan perguruan tinggi perlu diubah dari yang semula sebagai lembaga pembelajaran menjadi pusat-pusat keunggulan yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan.

*Perguruan tinggi dituntut memberi perhatian kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu*

2. Sebelum orang tua dan/atau calon mahasiswa menentukan jenis pendidikan tinggi atau perguruan tinggi tertentu yang akan menjadi pilihannya, sebaiknya mereka memahami dunia perguruan tinggi terlebih dahulu. Mereka perlu memahami bahwa kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan pendidikan tinggi dimaksudkan agar perguruan tinggi mampu meningkatkan kualitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggungjawab, dan ikut serta menciptakan bangsa yang kompetitif. Perguruan tinggi dituntut bisa mengembangkan program-program pendidikan yang mampu menjawab tantangan global, meningkatkan dan menyediakan fasilitas belajar-mengajar yang memadai, menyelenggarakan proses penerimaan yang transparan, dan dapat memberi perhatian kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Di samping itu perguruan tinggi juga dituntut dapat mengembangkan penelitian-penelitian unggulan dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.

3. Dalam rangka memandu orang tua dan calon mahasiswa memahami dunia pendidikan tinggi, pada bagian ini disampaikan informasi mengenai berbagai hal yang terkait

dengan dokumen *Higher Education Long Term Strategy (HELTS)* 2003-2010, yang menggantikan dokumen Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) 1996-2005. Berikut secara berurutan dijelaskan mengenai jenis program pendidikan tinggi, biaya pendidikan, kualitas pendidikan, kiat memilih perguruan tinggi, kehidupan kampus, dan sistem penerimaan yang adil dan transparan.

### JENIS PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

4. Sebaiknya orang tua dan calon mahasiswa mengetahui perguruan tinggi yang akan menjadi pilihannya. Sejak awal mereka harus memahami bahwa ada perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Depdiknas, dan ada pula perguruan tinggi yang berada di bawah departemen teknis (sekolah kedinasan). Pada bagian ini tidak dijelaskan mengenai sekolah kedinasan, tetapi menguraikan jenis program pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Depdiknas, yaitu program-program pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang harus diketahui dan dapat dipilih oleh orang tua dan/atau calon mahasiswa.
5. Program pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi sarjana dan pascasarjana, yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Program pendidikan akademik dalam pengembangannya lebih mengutamakan peningkatan mutu serta perluasan wawasan ilmu pengetahuan. Program pendidikan akademik menghasilkan lulusan yang memperoleh gelar akademik dan diselenggarakan melalui program sarjana, magister, dan doktor. Mereka yang lulus dari jenis program pendidikan akademik atau program pendidikan sarjana akan memperoleh gelar akademik seperti: sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik dan lain-lain.
6. Para orangtua dan calon mahasiswa dapat pula memilih pendidikan tinggi yang menawarkan program pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan dan keahlian terapan tertentu. Program pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang memperoleh keahlian dan diselenggarakan melalui program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4). Bila lulus dari program pendidikan vokasi atau diploma tidak mendapatkan gelar melainkan sebutan ahli seperti: Ahli Pratama (D1), Ahli Muda

*Sekolah kedinasan*

*Program pendidikan akademik*

*Program pendidikan vokasi*

(D2), Ahli Madya (D3), dan Sarjana Sains Terapan (D4). Waktu yang dibutuhkan jenjang diploma lebih pendek (2 semester untuk D1 dan 6 semester untuk D3) dibandingkan dengan program pendidikan sarjana (minimal 8 semester). Di samping itu, mereka yang lulus pada jenis program pendidikan ini relatif lebih mudah mendapatkan pekerjaan, karena jenis program pendidikan ini memang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang dapat diserap oleh lapangan pekerjaan. Meskipun demikian, calon mahasiswa dan orang tua harus terlebih dahulu mencari informasi tentang bidang apa saja yang masih banyak membutuhkan tenaga kerja.

*Program pendidikan profesi*

7. Berbeda dengan program pendidikan akademik dan vokasi, program pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, misalnya apoteker, akuntan, atau dokter. Setelah memperoleh keahlian khusus tersebut, yang bersangkutan dapat mengambil pendidikan lanjut, misalnya untuk dokter menjadi dokter spesialis.

*Bentuk perguruan tinggi: akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas*

8. Perguruan tinggi yang menawarkan program-program pendidikan tersebut di atas dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. Misalnya: Akademi Sekretaris, Akademi Seni Tari, dan lain-lain. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Misalnya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan lain-lain. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Misalnya: institut teknologi, institut seni, dan lain-lain. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

## BIAYA PENDIDIKAN

9. Selama ini banyak orang menganggap bahwa biaya pendidikan semata-mata hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Padahal, tidak sedikit orang tua dan calon mahasiswa yang telah menyadari bahwa kuliah di perguruan tinggi dipandang sebagai investasi bagi masa depan mereka. Oleh karena itu orang tua dan/atau mahasiswa semestinya ikut berkontribusi secara lebih signifikan terhadap biaya pendidikan.
10. Besar kecilnya biaya pendidikan sering menjadi pertimbangan utama bagi orang tua atau calon mahasiswa ketika memilih suatu perguruan tinggi. Demikian pula, berdasarkan alasan biaya ini, seorang mahasiswa dituntut untuk dapat menyelesaikan pendidikan tinggi dengan secepatnya dan tentu saja dengan hasil yang sebaik-baiknya, agar mampu bersaing di lapangan kerja dan mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan investasi yang telah ditanamkan.
11. Informasi mengenai biaya pendidikan di perguruan tinggi ini disampaikan agar orangtua dan calon mahasiswa mendapat gambaran mengenai beberapa hal, antara lain: mengapa biaya pendidikan di perguruan tinggi yang satu lebih besar dari yang lain; seberapa besar alokasi dana atau subsidi Pemerintah untuk perguruan tinggi; informasi mengenai beasiswa yang tersedia di perguruan tinggi; dan rencana penyusunan program kredit tanpa bunga bagi mahasiswa.

*Biaya Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat*

### Variasi Besarnya Biaya Kuliah

12. Beberapa tahun terakhir ini banyak kalangan yang mengeluh mengenai biaya kuliah yang semakin hari semakin mahal. Pandangan ini tidak salah, tetapi masyarakat sebaiknya juga memahami bahwa kuliah di perguruan tinggi itu sebenarnya memang melibatkan banyak komponen biaya, yang akhirnya apabila dirata-rata, diperkirakan biaya pendidikan per mahasiswa adalah sebesar Rp. 18,1 juta/tahun. Saat ini di Indonesia rata-rata biaya kuliah per mahasiswa per tahun adalah kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dengan demikian, dana penyelenggaraan yang diterima dari pemerintah maupun dari masyarakat masih belum mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu. Sementara itu, perlu untuk dipahami bahwa

*Upaya perguruan tinggi untuk mencari dana penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.*

bantuan biaya pendidikan tinggi dari pemerintah memang harus dibatasi, terutama apabila dibandingkan dengan biaya sektor-sektor publik lainnya, seperti pangan, kesehatan, perumahan dan lain sebagainya.

13. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tersebut, perguruan tinggi mencari dana dengan caranya masing-masing, antara lain dengan memberikan pelayanan profesi ataupun dengan menghimpun donasi dari alumni dan masyarakat. Besarnya biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa tidak sama antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lain, dan hal ini akan menentukan mutu pelayanan yang diberikan oleh perguruan tinggi tersebut. Variasi besarnya biaya kuliah tersebut terjadi tidak hanya antara universitas yang satu dengan yang lain, tetapi juga antar program studi dan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain yang berbeda tahun masuknya di perguruan tinggi yang bersangkutan.

### Subsidi Pemerintah dan Mutu Pendidikan

*Subsidi Pemerintah belum mencukupi untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu*

14. Pemerintah mengakui peranan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan bangsa akan orang-orang pintar, cerdas, dan cakap. Banyak orang masuk perguruan tinggi dengan harapan agar kehidupannya menjadi lebih baik, sekaligus meningkatkan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2003 sedikitnya ada 27 juta penduduk Indonesia berusia 19-24 tahun. Dari jumlah tersebut, 13 persen atau sekitar 3,54 juta terdaftar sebagai mahasiswa pada sekitar 2236 perguruan tinggi di Indonesia. Pada sisi lain, mutu perguruan tinggi di Indonesia dirasakan masih rendah. Hasil survei *Asiaweek* (2000) menempatkan perguruan-perguruan tinggi Indonesia pada posisi bawah. Dua universitas besar yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada berturut-turut menempati posisi 63 dan 68 dari 77 perguruan tinggi di Asia. Sedangkan Institut Teknologi Bandung menempati posisi 21 dari 39 perguruan tinggi bidang *Science and Technology* di Asia dan Australia. Bahkan, dari 100 universitas terbaik di Asia Pasifik yang dikompilasi oleh the *'Shanghai Jiao Tong University's Institute of Higher Education'* (2003) tidak satupun dari Indonesia yang masuk. Ada 5 (lima) kriteria yang digunakan dalam melakukan kompilasi tersebut, yaitu: 1) pemenang Nobel (fisika, kimia, kedokteran dan ekonomi), 2) peneliti yang sering dikutip dalam 21 subjek bidang keakhlian, 3) artikel dalam *Nature* dan *Science*, 4) *Citation index*, dan 5) kinerja masing-masing staf akademik.

15. Rendahnya mutu perguruan tinggi tersebut berkaitan dengan kemampuan pembiayaan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, komitmen pemerintah untuk pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia juga relatif rendah. Tabel di bawah dapat memberikan ilustrasi mengenai alokasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi per mahasiswa dibanding PDB per kapita di beberapa negara.

Negara	Alokasi pada tahun 1997 (%)
Cina	160.60 *
India	92.50
Indonesia	41.00 *
Malaysia	96.46 *
Filipina	42.00 *
Sri Lanka	64.00
Vietnam	86.10

Sumber: Bank Dunia, *Development Indicators, Education inputs*, 2002 (\* keadaan tahun 1999)

16. Dari tahun ke tahun pemerintah telah meningkatkan pemberian subsidi kepada pendidikan tinggi bahkan UUD telah mencantumkan 20 % dari APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan. Namun demikian, kemampuan Negara untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan baru sebesar 4,95% atau setara dengan 0,93% Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan anggaran subsektor pendidikan tinggi adalah 1,46% APBN, setara dengan 0,28% PDB (APBN 2003). Alokasi ini tergolong sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang dialokasikan negara-negara maju dan negara-negara tetangga. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain di Asia, alokasi APBN untuk subsektor pendidikan tinggi adalah yang terendah, seperti terlihat pada tabel di atas. Oleh karena itu untuk dapat terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, orang tua dan/atau mahasiswa harus turut menanggung biaya pendidikan.

17. Dengan belanja rutin pendidikan tinggi (*total spending*) sebesar Rp. 4,6 triliun dan dengan jumlah 880.000 mahasiswa PTN pada tahun 2003, maka anggaran biaya satuan pendidikan tinggi nasional rata-rata adalah sekitar Rp. 5,18 juta/mahasiswa/tahun. Dari jumlah tersebut biaya yang dipikul pemerintah (*public spending*) adalah Rp. 3,17 juta/mahasiswa/tahun. Sebagai perbandingan, belanja rutin pendidikan rata-rata di Amerika dan Kanada adalah US\$ 20,000 (Rp. 170 juta)/

mahasiswa/tahun, di Jepang dan Inggris US\$ 10,000 (Rp.85 juta)/mahasiswa/tahun, di Perancis dan Italia US\$ 6,000-7,000 (Rp 51-59,5 juta)/mahasiswa/tahun [Newsweek, September 2003], di Malaysia Rp. 29 s.d 111 juta/mahasiswa/tahun [Studi Biro Keuangan Departemen Pendidikan Nasional, Desember 2002], dan di Singapura Rp. 90 juta s.d. 400 juta/mahasiswa/tahun [www.singapore.edu.gov.sg]. Oleh karena itu untuk dapat terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, orang tua dan/atau mahasiswa harus turut menanggung biaya pendidikan.

#### Beasiswa

18. Sistem pendidikan tinggi yang cenderung bergeser ke arah kekuatan pasar juga membutuhkan peran Ditjen Dikti dalam menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang belum dan tidak mampu bersaing. Jaring pengaman untuk individu terutama dibutuhkan bagi peserta didik yang berasal dari kelompok berlatar belakang sosial ekonomi lemah, sehingga dibutuhkan mekanisme pemberian beasiswa yang terprogram dan sistematis. Sedangkan jaring pengaman bagi institusi akan dikonsentrasikan pada upaya pembinaan kapasitas institusi melalui berbagai pelatihan, *nurturing*, dan skema pendanaan yang mendorong tumbuhnya kapasitas internal.

19. Banyak variasi mengenai bentuk, jumlah ataupun sasaran penerima bantuan keuangan di perguruan tinggi. Demikian pula mengenai sumber atau asal beasiswa tersebut. Ada yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sektor swasta, dari luar negeri, ataupun dari masyarakat. Di samping itu dilihat dari sasaran penerima beasiswa terdiri atas beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi, mahasiswa golongan ekonomi lemah atau kombinasi antara keduanya. Informasi mengenai beasiswa ini biasanya tersedia di setiap perguruan tinggi.

#### Beasiswa peningkatan prestasi akademik.

20. Beberapa macam beasiswa yang selama ini ditawarkan, antara lain beasiswa peningkatan prestasi akademik, yaitu beasiswa yang diberikan untuk membantu mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu tetapi mempunyai kemampuan akademik tinggi (indeks prestasi yang tinggi). Terhadap mahasiswa seperti ini, pemerintah sangat mendorong agar perguruan tinggi yang bersangkutan berusaha untuk mencari atau menetapkan kebijakan pemberian beasiswa. Di masa





depan, Pemerintah akan mengupayakan tersedianya beasiswa secara penuh bagi mahasiswa yang berprestasi tapi berasal dari keluarga tidak mampu.

21. Beasiswa kerja merupakan bantuan keuangan pemerintah bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Beasiswa seperti ini persyaratannya memang hanya sebagai keluarga kurang mampu ekonomi. Akan tetapi penerimanya dipilih oleh masing-masing perguruan tinggi dan diwajibkan kerja bagi kepentingan perguruan tinggi. Jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja per minggu disesuaikan dengan kegiatan mahasiswa, seperti tenaga perpustakaan, laboratorium, asisten dosen, dan sebagainya.

*Beasiswa kerja*

22. Selain itu, banyak jenis beasiswa dari masyarakat baik dari dunia usaha, yayasan atau anggota masyarakat yang lebih luas, yang memberi bantuan keuangan kepada mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi, misalnya: Yayasan Supersemar, Mobil Oil, Keluarga Alumni masing-masing perguruan tinggi, dan sebagainya.

*Beasiswa dari masyarakat*

23. Beasiswa pendidikan di luar negeri biasanya meliputi biaya hidup dan biaya pendidikan. Selama ini ada beberapa sumber, antara lain berasal dari pemerintah RI (melalui dana pinjaman) dan hibah pemerintah negara sahabat misalnya dari Australia, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Austria, Amerika, Inggris, Kanada, dan lain-lain. Informasi beasiswa pendidikan luar negeri ini dapat dicari di situs internet negara yang bersangkutan.

*Beasiswa pendidikan di luar negeri*

#### Pinjaman Mahasiswa

24. Pemerintah sedang mengkaji pelaksanaan pinjaman mahasiswa. Bantuan keuangan dari pemerintah berupa pinjaman bagi mahasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai kuliahnya. Pinjaman ini harus dikembalikan setelah mahasiswa yang bersangkutan lulus dan bekerja.

*Pinjaman yang dikembalikan setelah mahasiswa lulus dan bekerja*

#### KUALITAS PENDIDIKAN

25. Pemerintah menghendaki agar semua perguruan tinggi memberikan pendidikan dengan mutu yang terbaik. Upaya mencapai dan mempertahankan kualitas tersebut antara lain dilakukan dengan cara "akreditasi" sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah. Selain itu, dengan strategi dan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi yang baru ini dimungkinkan dilakukannya kontrol dari masyarakat.

*Pemerintah mendorong perguruan tinggi memiliki keunggulan masing-masing*

26. Agar fungsi perguruan tinggi sebagai pusat-pusat keunggulan yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan dapat terwujud, pemerintah mendorong agar setiap perguruan tinggi memiliki keunggulan masing-masing, baik di bidang pengajaran, penelitian dan dalam membina hubungan dengan dunia usaha untuk mengembangkan produk barang dan jasa.

27. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tersebut dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain strategi pembiayaan yang berbasis kompetisi. Strategi ini menyediakan dana pengembangan dalam bentuk kompetisi dengan harapan perguruan tinggi yang bersangkutan dapat meningkatkan kualitas sesuai dengan visi dan misinya secara keseluruhan. Kebijakan Pemerintah tersebut diambil mengingat kemampuan negara untuk mencukupi biaya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi untuk seluruh perguruan tinggi sangat terbatas. Untuk itu, agar keperluan biaya operasional penyelenggaraan pengajaran yang berkualitas maupun untuk upaya-upaya inovasi proses pembelajaran dapat terpenuhi dengan wajar, maka partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan.

#### PTN ATAU PTS YANG LEBIH BAIK ?

*Anggapan bahwa PTN selalu lebih baik dari PTS adalah mitos belaka*

28. Apakah perguruan tinggi negeri (PTN) selalu lebih baik dari perguruan tinggi swasta (PTS)? Jawabannya adalah tidak selalu. Ada PTS yang memiliki kualitas yang tidak kalah dengan PTN. Anggapan bahwa PTN selalu lebih baik dari PTS adalah mitos belaka yang selama ini telah dipercaya oleh banyak orang. Anggapan ini muncul karena perguruan tinggi negeri umumnya memiliki sumber daya yang lebih baik, misalnya jumlah dosen yang bergelar doktor lebih banyak. Hal ini disebabkan karena pada masa yang lalu pemerintah lebih memusatkan bantuannya kepada perguruan tinggi negeri.

29. Masyarakat juga sering beranggapan bahwa PTS dengan biaya pendidikan yang lebih tinggi adalah perguruan tinggi yang bermutu. Padahal ini bukanlah satu-satunya patokan. Masyarakat perlu memperhatikan hal lain yang dapat membantu menilai mutu suatu perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di bawah.

## KIAT MEMILIH PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

30. Ketika hendak melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, seorang calon mahasiswa tentunya akan bertanya perguruan tinggi mana yang sebaiknya dipilih. Pertanyaan ini sifatnya sangat subyektif. Dengan adanya lebih dari 2000 perguruan tinggi di Indonesia, keputusan untuk memilih suatu perguruan tinggi memang bukan keputusan yang mudah. Namun, jangan sekali-kali memilih perguruan tinggi hanya karena pertimbangan *prestise* perguruan tinggi tersebut, atau dengan pertimbangan yang dangkal misalnya karena nama perguruan tinggi tersebut terkenal, banyak teman yang kuliah disana, atau hanya karena tempatnya yang bagus.

31. Untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, seorang calon mahasiswa terlebih dahulu harus dapat mengukur kemampuannya, menentukan bidang apa yang diminatinya, menentukan jenis program pendidikan yang diinginkannya, dan mencari informasi mengenai perguruan tinggi mana yang menyelenggarakan bidang yang diminatinya tersebut. Termasuk menanyakan pada dirinya, apa yang menjadi cita-citanya? Keahlian apa yang diperlukan bila seorang mahasiswa memilih karir tertentu? Apakah calon mahasiswa yang bersangkutan ingin belajar jauh dari orangtuanya? Berapa dana yang dibutuhkan? Pendeknya, ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan ketika akan memilih suatu perguruan tinggi, antara lain bidang studi, jurusan, biaya, reputasi perguruan tinggi yang bersangkutan, status akreditasi, fasilitas pendidikan yang tersedia, serta kualitas dan kuantitas dosen yang dimilikinya.

## Bidang Studi

32. Hal pertama yang harus diperhatikan para calon mahasiswa adalah minat yang akan berkaitan dengan bidang studi yang hendak ditekuni oleh calon mahasiswa. Untuk memilih bidang studi ini, jangan segan-segan untuk mencari informasi termasuk kepada orangtua, teman maupun guru. Lebih baik lagi jika bertanya kepada orang yang telah terjun langsung ke dunia kerja di bidang yang diminatinya. Intinya adalah pastikan bahwa calon mahasiswa atau orangtua mengerti benar tentang perbedaan antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lain, terutama bidang studi yang memiliki kemiripan dengan bidang studi yang diminatinya.

*Kiat memilih perguruan tinggi**Perguruan tinggi yang menawarkan program studi yang diminati calon mahasiswa**Minat calon mahasiswa*

33. Calon mahasiswa maupun orang tua seringkali mengalami kesulitan mencari informasi mengenai bidang studi di perguruan tinggi. Namun, janganlah berkecil hati. Selain menanyakan kepada orang-orang yang dianggap mengerti tentang pendidikan tinggi, calon mahasiswa dan orangtua harus gigih mencari dan menggunakan berbagai saluran informasi yang tersedia, dari yang sederhana misalnya datang atau berkirim surat meminta informasi ke perguruan tinggi yang bersangkutan, sampai dengan yang canggih misalnya dengan memanfaatkan internet. Dengan memanfaatkan Internet, yang relatif murah biayanya, calon mahasiswa dapat mengikuti *mailing list* (atau disingkat 'milis') yang berhubungan dengan masalah pendidikan tinggi, misalnya untuk mendapatkan beasiswa. Contoh mailing list untuk topik pendidikan tinggi dan beasiswa adalah milis [beasiswa@yahoogroups.com](mailto:beasiswa@yahoogroups.com) dimana para anggota *mailing list* (milis) saling bertukar informasi, dan calon mahasiswa atau orangtua dapat menyampaikan berbagai pertanyaan seputar pendidikan tinggi yang diminati. Untuk berlangganan cukup kirimkan *email* ke alamat [beasiswa-subscribe@yahoogroups.com](mailto:beasiswa-subscribe@yahoogroups.com). Selain milis tersebut dapat pula digunakan *search engine* seperti Google (<http://www.google.com>), dan untuk mendapatkan informasi yang dicari cukup memasukkan kata-kata kunci di situs tersebut.

34. Setelah calon mahasiswa atau orangtua mengetahui bidang studi yang diinginkan, selanjutnya calon mahasiswa atau orangtua mencari informasi mengenai perguruan tinggi mana saja yang menawarkan bidang studi tersebut. Dalam hal ini, calon mahasiswa atau orangtua sebaiknya menyesuaikan nilai akademis SMU yang diperoleh dengan persyaratan masuk suatu program pada perguruan tinggi yang diinginkannya. Jangan sampai calon mahasiswa atau orangtua memilih suatu program hanya karena pertimbangan gelar atau sebutan yang akan diperolehnya. Akan lebih baik lagi apabila calon mahasiswa atau orangtua meneliti pula matakuliah-matakuliah yang ditawarkan.

35. Setelah menentukan pilihan bidang studi selanjutnya calon mahasiswa harus menentukan jenis program pendidikan apa yang ingin dipilih yaitu program sarjana atau program diploma.



**Biaya**

36. Salah satu hal yang sangat penting adalah pertimbangan mengenai biaya kuliah. Sebaiknya terlebih dahulu bicarakan dengan orang yang akan membiayai kuliah, atau teliti keadaan keuangan yang dimilikinya bila akan membiayai kuliah sendiri. Sesuaikan jumlah dana yang tersedia dengan biaya kuliah di perguruan tinggi yang akan menjadi pilihannya. Buatlah rencana pembiayaan untuk melihat jumlah dana yang tersedia selama masa studi. Jangan mengandalkan pekerjaan sampingan. Pastikan bahwa dana yang dimiliki cukup untuk membiayai kuliah sampai selesai. Risiko apabila dana tidak mencukupi adalah kerugian yang cukup besar, yaitu dana yang telah dikeluarkan sudah banyak, waktu terbuang percuma, dan kuliah tidak selesai.

*Sesuaikan jumlah dana yang tersedia dengan biaya kuliah di perguruan tinggi*

**Reputasi**

37. Pertimbangan yang paling mudah digunakan untuk memilih perguruan tinggi adalah dengan melihat reputasinya. Suatu perguruan tinggi yang memiliki reputasi yang baik dapat dilihat dari sarana belajar mengajarnya dan fasilitas yang dipunyai. Reputasi perguruan tinggi ini dapat dilihat juga dari lulusannya, yaitu apakah para lulusannya tidak kesulitan dalam mencari pekerjaan, ataupun untuk meneruskan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

*Reputasi suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari sarana belajar mengajarnya dan fasilitas yang dipunyai*

**Status Akreditasi**

38. Akreditasi merupakan salah satu aspek yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memilih perguruan tinggi. Lembaga yang mengawasi kinerja perguruan tinggi dan memberikan akreditasi adalah Badan Akreditasi Nasional (BAN). Banyak calon mahasiswa atau orang tua yang tidak menggunakan atau bahkan tidak mengetahui bahwa akreditasi BAN dapat digunakan sebagai patokan berkualitas tidaknya sebuah perguruan tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena masih kurangnya transparansi dan sosialisasi akreditasi BAN itu sendiri. Padahal metode dan sistem penilaian yang digunakan BAN cukup memadai. BAN menggunakan banyak kriteria sebagai indikator kinerja suatu perguruan tinggi, seperti indikator kinerja program studi, jumlah tenaga akademik, sarana dan prasarana, kondisi mahasiswa, kondisi kelulusan, dan biaya yang diperlukan dari sejak masuk sampai dengan seorang mahasiswa lulus.

*Akreditasi BAN dapat digunakan sebagai patokan berkualitas tidaknya sebuah perguruan tinggi*

39. Akreditasi adalah penentuan standar mutu serta penilaian terhadap suatu perguruan tinggi oleh pihak di luar perguruan tinggi itu sendiri. Status akreditasi diberikan kepada program studinya bukan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Status akreditasi ini menentukan kemandirian dan kualitas dalam proses belajar mengajar. Akreditasi BAN merupakan suatu keharusan bagi setiap program studi di semua perguruan tinggi agar lulusannya diakui oleh pemerintah Indonesia. Sampai dengan tahun 2003 BAN telah mengakreditasi 4959 program studi tingkat sarjana pada perguruan tinggi dengan rincian: 541 program studi mendapat akreditasi A; 2360 mendapatkan akreditasi B; 1838 mendapatkan akreditasi C; dan 220 program studi mendapatkan akreditasi D atau tidak terakreditasi.

**Fasilitas Pendidikan**

40. Selain gedung atau ruangan yang mencukupi untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang baik, fasilitas lain sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mahasiswa, seperti laboratorium (komputer, akuntansi, bahasa dan lain-lain), bengkel, studio dan perpustakaan. Untuk dapat benar-benar memahami persoalan ini, cobalah datang langsung ke perguruan tinggi yang bersangkutan dan mencari informasi atau menanyakan pada semester berapa seorang mahasiswa berkesempatan menggunakan fasilitas yang tersedia, misalnya semester 3, 4 atau 5. Demikian juga perhitungkan jumlah mahasiswa yang harus menggunakan fasilitas tersebut, yaitu apakah jumlah laboratorium memenuhi syarat untuk jumlah mahasiswa tertentu.

**Kualitas dan Kuantitas Dosen**

41. Penting juga untuk diketahui oleh orang tua atau calon mahasiswa adalah keadaan tenaga pengajar atau dosen perguruan tinggi tersebut. Sebaiknya orangtua atau calon mahasiswa mencari tahu mengenai jumlah dan kualitas dosen, misalnya berapa orang guru besar yang dimiliki, dan berapa jumlah dosen yang sudah bergelar S2 dan S3. Keadaan sumber daya dosen ini memberikan gambaran mengenai kualitas keilmuan yang diemban oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Bagi mereka yang akan masuk ke perguruan tinggi swasta, persoalan ini perlu untuk mendapat perhatian.

*Kualitas dan kapasitas fasilitas yang tersedia*

*Keadaan sumber daya dosen*

## KEHIDUPAN KAMPUS

42. Selain kriteria di atas, orangtua dan calon mahasiswa juga harus memahami suasana kehidupan kampus perguruan tinggi yang akan dimasukinya. Pengetahuan tentang suasana kehidupan kampus ini memang tidak secara langsung dapat digunakan untuk menentukan pilihan tentang perguruan tinggi yang baik atau bukan. Pengetahuan ini diperlukan karena kelak akan menentukan keberhasilan studi mahasiswa yang bersangkutan.

*Kehidupan kampus mempunyai ciri adanya kebebasan berpendapat, bersikap kritis dan menghargai perbedaan pendapat*

43. Orangtua dan calon mahasiswa harus memahami bahwa secara umum kehidupan kampus memang berbeda dengan kehidupan di luar kampus. Kehidupan di kampus mempunyai ciri adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat berdasarkan fakta dan data, bersikap kritis dan menghargai perbedaan pendapat. Kehidupan kampus disebut juga sebagai kehidupan masyarakat ilmiah, yang tentu saja berbeda dengan kehidupan masyarakat di luar kampus.

44. Kehidupan akademik kampus juga berbeda dengan kehidupan akademik di Sekolah Menengah Umum (SMU), dimana para guru berperan langsung dalam proses pembelajaran. Kehidupan akademik di perguruan tinggi bertumpu pada aspek kemandirian belajar. Mahasiswa dituntut untuk mampu mengatur dirinya sendiri dalam proses belajarnya, untuk itu dia diminta untuk mandiri, proaktif, kritis dan kreatif. Peranan dosen adalah memfasilitasi kemandirian tersebut.

## SISTEM PENERIMAAN YANG ADIL DAN TRANSPARAN

45. Selain jalur Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang diselenggarakan secara nasional yang merupakan kesatuan integratif dari 49 perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia, termasuk PT BHMN, ada beberapa jalur lain yang dikembangkan oleh masing-masing PTN, antara lain jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD), Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), jalur kemitraan, dan sebagainya (termasuk bagi PTN yang tidak tergabung ke SPMB).

*Beberapa jalur seleksi mahasiswa: SPMB, PBUD, PMDK, kemitraan, dan sebagainya*

46. Sedangkan untuk sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS), setiap calon mahasiswa diharuskan mendaftar dan mengikuti seleksi secara terpisah ke setiap perguruan tinggi yang diinginkannya. Informasi tentang sistem penerimaan setiap PTS, secara umum dapat dilihat di <http://www.pts.co.id>.

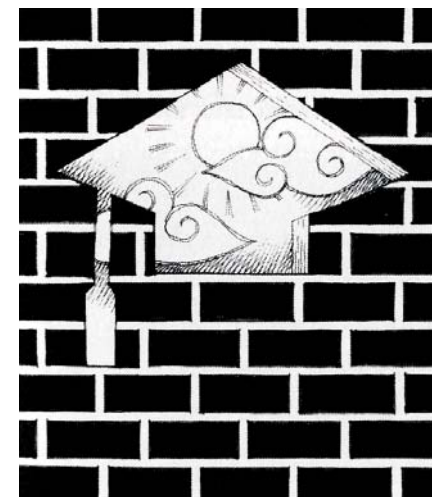
47. Perlu diketahui oleh calon mahasiswa dan orang tua tentang data pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa secara nasional jumlah peserta SPMB (untuk 48 PTN) adalah 350.306 peserta, dengan probabilitas kelulusan mencapai 18,5 s.d 20,0 persen. Walaupun demikian tingkat keketatan atau kompetisi untuk diterima di suatu PT berbeda antara satu PT dengan PT yang lain (hal ini berlaku juga untuk PTS). Penerimaan di beberapa PT sangat kompetitif, dengan demikian diharapkan seorang calon mahasiswa dapat memilih dengan baik PT yang sesuai dengan kemampuan akademiknya, agar kemungkinan untuk diterima lebih besar.

48. Terhadap penyelenggaraan seleksi melalui berbagai jalur tersebut, pemerintah melakukan fungsi kontrol agar masing-masing sistem dilaksanakan secara adil dan transparan, termasuk mendorong agar memberikan perhatian kepada calon mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu. Namun di atas itu semua, pemerintah juga telah berusaha meningkatkan kualitas SMU agar semakin banyak lulusannya yang memiliki kualifikasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan cara ini, diharapkan sistem penerimaan mahasiswa dapat dilaksanakan secara adil berdasarkan kesamaan hak (*equal access*) dan kemampuan (meritokrasi).

Strategi Jangka Panjang

## Pendidikan Tinggi 2003 - 2010

Informasi bagi pemerintah daerah





## Informasi bagi pemerintah daerah

### LATAR BELAKANG

*Keterkaitan pengembangan pendidikan tinggi dengan pembangunan daerah*

1. Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pembangunan di daerah. Keterkaitan antara pendidikan tinggi dan pemerintah daerah tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, pendidikan tinggi dapat berperan menunjang upaya pemerintah daerah dalam pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah, terutama sektor-sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, tentunya dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pada sisi yang lain, pemerintah daerah dapat berperan menunjang pengembangan pendidikan tinggi, khususnya kegiatan perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat terlaksana apabila ada upaya nyata untuk mendorong kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Keberhasilan pembangunan daerah diberbagai sektor akan meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengatasi masalah-masalah nasional, dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional.

*Belum efektifnya kerjasama pemerintah daerah & perguruan tinggi*

2. Kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah saat ini dirasakan belum cukup efektif bagi pembangunan daerah, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan pengembangan potensi unggulan daerah. Hal ini mungkin terjadi karena perguruan tinggi saat ini banyak memfokuskan pada peningkatan kualitas dharma pendidikan daripada pengabdian pada masyarakat. Sementara pemerintah daerah juga belum maksimal dalam upaya meningkatkan sinergi dengan perguruan tinggi.

Untuk itu, pada bagian ini dipaparkan beberapa isu pokok yang terkait dengan kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, yaitu: relevansi kegiatan perguruan tinggi bagi pemerintah daerah, membangun kerjasama atau perwujudan sinergi kedua belah pihak, strategi mewujudkan kerjasama, dan mekanisme pembiayaan.

**RELEVANSI PROGRAM KEGIATAN PERGURUAN TINGGI BAGI PEMERINTAH DAERAH**

4. Salah satu persoalan bangsa dan negara yang menonjol saat ini adalah masalah “kesenjangan antar daerah” (*regional disparity*). Kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan kemampuan ekonomi, kondisi sosial masyarakat, infrastruktur, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, bangsa ini harus berupaya mewujudkan masyarakat berpendidikan yang mampu dan mau memikirkan pembangunan daerah secara sistematis, efektif, arif dan bijaksana.

*Mengatasi masalah kesenjangan antar daerah*

5. Dalam kerangka pengembangan pendidikan nasional yang lebih luas, pemerintah daerah semestinya terdorong untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah yang bersangkutan. Peningkatan alokasi anggaran untuk sektor ini terutama dapat diarahkan pada mutu pelayanan pendidikan. Di lain pihak, perguruan tinggi semestinya juga meningkatkan komitmen pada program kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu darma-nya yang langsung dapat dirasakan atau dimanfaatkan daerah.

*Peran perguruan tinggi dalam mengatasi kesenjangan antar daerah*

6. Peran pendidikan tinggi dalam mengatasi kesenjangan antar daerah dapat ditempuh melalui beberapa program kegiatan perguruan tinggi, antara lain:

- melalui program pendidikan guru, yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan mutu pendidikan;
- melalui program pengembangan sumber daya manusia termasuk pegawai pemerintah daerah, yang diharapkan mampu mengembangkan mutu pengelolaan sumber daya daerah, termasuk meningkatkan sumber daya alam yang potensial;
- melalui program penelitian, yang diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan, potensi sumber daya, dan prioritas pembangunan daerah;
- melalui berbagai program pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan prioritas daerah yang bersangkutan.

*Peningkatan kualitas Guru sebagai unsur penentu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat*

7. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab atas pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah tersebut khususnya dalam konteks peningkatan kualitas terkait dengan mutu tenaga pendidik (guru). Dalam hal ini, perguruan tinggi merupakan mitra yang potensial, terutama dalam menghasilkan guru yang bermutu maupun meningkatkan mutu guru yang sudah ada yang akan memikirkan pendidikan masyarakat di daerah. Guru yang berkualitas akan mampu menjadi ujung tombak dalam peningkatan masyarakat terdidik di daerah. Apabila jumlah guru yang berkualitas cukup memadai, upaya menciptakan masyarakat terdidik akan dapat dengan cepat tercapai. Dengan kata lain, masyarakat terdidik merupakan wujud SDM daerah yang berkualitas yang pada gilirannya akan secara efektif turut serta dalam proses peningkatan kesejahteraan daerah yang bersangkutan.

**Good Practices dari Pemerintah Daerah Bantul**

Bupati Bantul merasakan keadaan yang sangat ironis karena di wilayahnya yang hanya berjarak 4 km dari “kota pelajar” Yogyakarta, jumlah guru yang siap mengajar secara berkualitas hanya sekitar 11%. Menurutnya, mencerdaskan bangsa tempatnya adalah di sekolah, bukan di departemen dan bukan di Pemerintah daerah. Oleh karenanya, Bupati telah melakukan tindakan “revolusi” dalam bidang pendidikan. Langkah pertama yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas guru di Bantul adalah bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Proses untuk menentukan materi dan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Bantul, dilakukan dengan diskusi dan dialog secara langsung antara Rektor dan Pemda Bantul selama 6 bulan. Langkah berikutnya adalah menyekolahkan staf pemerintah daerah ke jenjang pendidikan lanjut, terutama S2. Staff Pemerintah daerah yang telah lulus pendidikan S2 saat ini membentuk semacam paguyuban yang akan menyumbangkan pemikiran sekaligus mengkritisi kebijakan bupati. Anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah sebesar 2 (dua) milyar rupiah setiap tahun.

*Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah*

8. Kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mencerdaskan masyarakat tidak saja terbatas pada peningkatan kualitas guru tetapi juga dalam upaya mengembangkan kemampuan pegawai pemerintah daerah. Peningkatan kualitas pegawai pemerintah daerah tersebut dapat ditempuh melalui berbagai skema kerjasama, yaitu baik melalui jalur program pendidikan formal, maupun melalui berbagai program kegiatan pelatihan yang bisa disediakan



perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Skema kerjasama ini dilaksanakan dengan target untuk mencapai tingkat kualitas kemampuan pegawai sesuai dengan standar kompetensi SDM secara nasional maupun internasional.

9. Pengembangan program sesuai kebutuhan (sering dikenal sebagai program *tailor made*) sebagaimana telah dikembangkan di Kabupaten Bantul di atas dapat digunakan sebagai model kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Contoh studi kasus di Bantul tersebut menunjukkan bahwa minat daerah dalam mengembangkan SDM telah mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada sisi lain, jika inisiatif Bupati Bantul tersebut dapat dikembangkan secara luas di daerah-daerah kabupaten dan kota lain, maka tidak saja akan menjadi bukti mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan, tetapi juga bisa diarahkan kepada program-program pembangunan daerah yang lebih nyata, seperti rencana jangka panjang pembangunan desa-desa di seluruh Nusantara.

10. Perguruan tinggi di suatu daerah, baik negeri maupun swasta, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dengan menitikberatkan pada potensi dan kebutuhan daerah setempat. Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat tersebut dapat diarahkan pada penyelesaian masalah suatu daerah yang langsung bermanfaat pada masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dibiayai oleh perguruan tinggi, dana rutin pemerintah maupun oleh sponsor. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana bagi perguruan tinggi guna melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut mengingatkan pada konsep yang sering disebut dengan "*link and match*", konsep kerjasama berdasarkan asas kesesuaian dan saling menguntungkan.

*Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat*

### MEMBANGUN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERGURUAN TINGGI

*Otonomi daerah dan otonomi perguruan tinggi*

11. Otonomi daerah telah membuka peluang semakin besar bagi pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten, untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Dengan adanya otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur rencana pembangunan daerah secara lebih mandiri sesuai dengan kebutuhan wilayahnya, serta sekaligus memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran secara mandiri dan bertanggungjawab melalui mekanisme DAU. Sementara itu, otonomi perguruan tinggi yang awalnya dimulai dengan *pilot project* terhadap empat Perguruan Tinggi Negeri (UI, UGM, ITB, dan IPB), yang kemudian pada tahun 2003 dan 2004 menyusul USU dan UPI menjadi PT-Badan Hukum Milik Negara diarahkan menuju kepada perguruan tinggi dengan pengelolaan yang lebih mandiri, fleksibel dan akuntabel. Tata cara pengelolaan perguruan tinggi otonom tersebut diharapkan mampu memberikan peluang dalam pengembangan program pendidikan dan layanan kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan daerah. Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi nasional, yang dimuat dalam dokumen *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010*, telah mencanangkan arah perubahan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi otonom yang dimiliki negara. Untuk mencapai otonomi perguruan tinggi tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama-sama dengan institusi terkait mengembangkan lebih lanjut: landasan hukum tentang status otonomi perguruan tinggi, sistem penganggaran dan proses pengelolaan yang mendukung inovasi, efisiensi dan keunggulan suatu perguruan tinggi.

*Peluang Kerjasama melalui otonomi*

12. Dengan perubahan status kewenangan yang lebih otonom atau mandiri baik pada pemerintah daerah maupun perguruan tinggi, maka berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dapat ditingkatkan secara lebih fleksibel. Suatu perguruan tinggi otonom di suatu daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menitikberatkan pada kebutuhan dan potensi daerah setempat. Sementara itu, pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi terhadap suatu perguruan tinggi untuk





memfokuskan arah pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terhadap hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan yang sedang dijalankan di daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain, perguruan tinggi perlu mengembangkan komitmen tridarmanya secara lebih arif dan bijaksana dengan mendasarkan pada kompetensi dan relevansi pembangunan daerah baik diminta maupun tidak oleh pemerintah.

13. Salah satu bentuk nyata keterkaitan arah kebijakan suatu perguruan tinggi dengan pemerintah daerah adalah dimungkinkannya adanya representasi atau perwakilan pemerintah daerah yang duduk pada Majelis Wali Amanat Universitas (MWA). MWA merupakan organ dari suatu perguruan tinggi yang bertindak mewakili kepentingan pemerintah (untuk Perguruan Tinggi Negeri) atau badan penyelenggara (untuk Perguruan Tinggi Swasta) dan masyarakat. Keterwakilan pemerintah daerah ini akan dapat memberikan masukan langsung bagi rencana strategis universitas yang sejalan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Beberapa Peraturan Pemerintah PT-BHMN, yang merupakan Anggaran Dasar perguruan tinggi yang bersangkutan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjadi anggota MWA. Sebaliknya, pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan anggaran belanja daerah bagi pengembangan program-program kerjasama dengan perguruan tinggi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

*Representasi Pemerintah daerah di Majelis Wali Amanat suatu Perguruan Tinggi*

#### STRATEGI MEWUJUDKAN KERJASAMA

14. Dalam mewujudkan kerjasama atau menciptakan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah harus didukung dengan prasyarat utama, yakni saling berbagi informasi. Pada abad informasi, dimungkinkannya mengembangkan beragam media sehingga baik perguruan tinggi maupun pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang lengkap, benar dan transparan sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pemerintah daerah diharapkan dapat menginformasikan hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan termasuk hasil pembangunan yang sudah dicapai, sehingga perguruan tinggi dapat merespon secara positif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

*Peningkatan sistem komunikasi & Informasi serta akuntabilitas publik*

15. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang sudah dicapai oleh perguruan tinggi, termasuk mengetahui program-program pendidikan yang ditawarkan, macam pelayanan kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mendapatkan informasi dari perguruan tinggi melalui banyak cara, misalnya datang langsung pada bagian kerjasama perguruan tinggi, melalui surat, kontak telepon maupun dengan mengakses situs internet/*website* yang dimiliki perguruan tinggi. Sebagai contoh perguruan tinggi biasanya memberikan informasi kepada publik terutama terkait dengan hal-hal seperti:

- program-program pendidikan yang ditawarkan;
- hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- jumlah mahasiswa dan tingkat kompetisi untuk masuk perguruan tinggi yang bersangkutan;
- jumlah lulusan dan jumlah lulusan yang sudah memperoleh pekerjaan dalam satu periode setahun lulusan;
- jumlah, macam, dan kualitas kepakaran dosennya;
- sumber dana dan jumlah yang diperlukan untuk pengembangan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan lain sebagainya.

*Inisiatif menjalin komunikasi*

16. Jika masing-masing pihak (pemerintah daerah dan perguruan tinggi) telah membangun basis data informasi, maka langkah penting berikutnya adalah mendorong terwujudnya komunikasi keduanya. Pemerintah Daerah dapat meminta pihak perguruan tinggi agar lebih pro-aktif untuk berinisiatif dalam memberi informasi dan mensosialisasikan program-program kegiatannya, termasuk dalam menggalang kerjasama. Terutama jika kapasitas SDM pemerintah daerah untuk berinisiatif menjalin komunikasi dengan pihak perguruan tinggi dan kemampuan dalam mengidentifikasi suatu persoalan tertentu secara umum masih belum memadai.

**PEMBIAYAAN PROGRAM KERJASAMA**

17. Dalam peraturan perundangan, biaya peningkatan sektor pendidikan, termasuk bagi pendidikan tinggi merupakan komitmen dan tanggung-jawab pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat. Jika pemerintah daerah, meyakini peran pendidikan tinggi semakin penting dan relevan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, maka langkah pemerintah daerah mengalokasikan dana bagi kerjasama dengan pendidikan tinggi perlu didukung. Perlu diketahui bahwa perguruan tinggi otonom memerlukan dukungan pembiayaan yang partisipatif dari berbagai sumber daya keuangan, baik dari pusat, daerah, masyarakat maupun industri, yang akan dikelola secara sinergis.

*Tanggungjawab pembiayaan sektor pendidikan*

18. Apabila pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pendidikan tinggi, maka berbagai program kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat dikembangkan melalui beberapa skenario alokasi anggaran dan kegiatan sebagai berikut:

*Alokasi pembiayaan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi*

- alokasi anggaran ditujukan kepada program yang diprioritaskan, misal: program peningkatan SDM guru-guru dan program studi lanjut staf pemerintah daerah,
- alokasi anggaran diberikan kepada institusi, misalnya dalam kasus kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemerintah daerah bisa langsung mengalokasikan dana kepada perguruan tinggi tertentu,
- alokasi anggaran ditujukan langsung kepada masyarakat atau individu-individu di daerah tertentu, misalnya berupa beasiswa kepada para mahasiswa daerah setempat,
- atau model-model lain dalam menggalang dana masyarakat maupun industri melalui peran pemerintah daerah sebagai *leading sector* dalam pembangunan daerah.

**KONDISI YANG DIHARAPKAN DI MASA DEPAN**

19. Di masa depan, perguruan tinggi dan pemerintah daerah harus berperan secara pro-aktif dan partisipatif untuk menciptakan sinergi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah terutama kesenjangan dalam hal kualitas pendidikan masyarakat dan kesenjangan pembangunan daerah.

*Peningkatan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan antar daerah*

20. Pengembangan perguruan tinggi diharapkan juga dapat menunjang upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, antara lain baik dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Hal ini dilakukan

*Mendukung pengembangan sektor ekonomi, sosial dan budaya*

dengan pengembangan relevansi dan kompetensi perguruan tinggi dengan memperhatikan prioritas kebutuhan daerah dan potensi unggulan daerah.

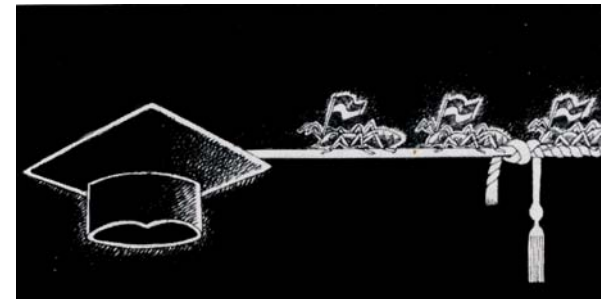
*Sinergi sistem informasi dan komunikasi*

21. Dalam mewujudkan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan sistem dan media pertukaran informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan strategik yang dihadapi pemerintah daerah dan potensi sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimiliki perguruan tinggi.

*Dukungan masyarakat*

22. Terwujudnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi melalui berbagai program kerjasama juga diharapkan memiliki legitimasi atau didukung oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah yang bersangkutan.

Strategi Jangka Panjang  
**Pendidikan Tinggi 2003 - 2010**  
Informasi bagi filantropis, organisasi  
dan lembaga swadaya masyarakat





## Informasi bagi filantropis, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat

### LATAR BELAKANG

*Filantropis, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat berpotensi besar dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi nasional*

1. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di Indonesia masih relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini menyebabkan sebagian besar masyarakat dalam bekerja lebih mengandalkan kemampuan fisik ketimbang kemampuan intelektualnya.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) merupakan institusi yang berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada jenjang pendidikan tinggi. Ditjen Dikti menerapkan strategi yang dikenal dengan paradigma baru untuk mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang efektif dan efisien.
3. Dalam menerapkan strategi tersebut, Ditjen Dikti memerlukan bantuan dari berbagai pihak, diantaranya seperti yang tertuang di dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 54 ayat 1, bahwa organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan (termasuk individu dan media massa) diminta untuk dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Berbagai komponen masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam upaya menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu ujung tombak penggerak pembaharuan di Indonesia.
4. Kontribusi berbagai komponen masyarakat dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk antara lain penyediaan beasiswa, dana bantuan pengembangan pendidikan tinggi, meningkatkan akuntabilitas pendidikan tinggi, serta pendidikan masyarakat melalui media massa.

**PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI PILAR UTAMA MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA**

- 5. Pendidikan tinggi mempunyai peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada level yang lebih tinggi, untuk memacu daya saing bangsa secara keseluruhan. *Peran strategis pendidikan tinggi: peningkatan kualitas SDM*
- 6. Pada saat ini, pendidikan tinggi di Indonesia belum menunjukkan kemampuan daya saing yang memadai pada tingkat global. Tidak satupun perguruan tinggi di Indonesia yang masuk peringkat 100 di Asia dan peringkat 500 di Dunia (Sumber: Laporan yang disampaikan oleh Shanghai Jiao Tong University Institute of Higher Education (2003)).
- 7. Pada tingkat nasional, upaya peningkatan daya saing institusi pendidikan tinggi telah dilakukan Ditjen Dikti sejak awal tahun 1990-an melalui kebijakan yang tertuang di dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang dan dilanjutkan dengan *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS 2003-2010). Melalui kebijakan tersebut, institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitasnya melalui berbagai program pengembangan, seperti program University Research for Graduate Education (URGE, 1990), Development of Undergraduate Education (DUE, 1994), Quality for Undergraduate Education (QUE, 1996), Semi-QUE (1999), DUE-like (1999), Technological and Professional Skills Development Project (TPSDP, 2000), serta Program A1, A2, B (2004). *Upaya peningkatan kualitas*
- 8. Di dalam HELTS 2003-2010 telah dirumuskan bahwa peningkatan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*) merupakan salah satu strategi utama dalam pengembangan pendidikan tinggi. Dunia pendidikan tinggi diharapkan dapat menjadi pilar utama bagi keberhasilan bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain. *Peningkatan daya saing bangsa*
- 9. Peningkatan kualitas pengelolaan institusi pendidikan tinggi merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada institusi pendidikan tinggi melalui penerapan PP 61/1999 (otonomi) dan upaya menjadikan perguruan tinggi sebagai bada hukum pendidikan sebagaimana diamanatkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, implementasi kewenangan institusi pendidikan tinggi tersebut masih perlu *Otonomi*

- 10. Dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa, institusi pendidikan tinggi dituntut untuk dapat memperhatikan kebutuhan pasar kerja sehingga lulusan yang dihasilkan dapat diserap pasar kerja. Masing-masing institusi pendidikan tinggi diharapkan melakukan penyesuaian kurikulumnya agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja maupun perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam hal ini, masukan dari berbagai komponen masyarakat (individu, media massa, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dll.) sangat diharapkan, untuk bisa merumuskan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. *Kurikulum yang relevan*
- 11. Dunia kerja pada saat ini membutuhkan lulusan pendidikan tinggi yang berkemampuan akademis baik, dan mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kemampuan akademis yang sebagian besar dapat dipenuhi dari kegiatan di kampus harus diimbangi dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang tergantung pada kondisi lingkungannya. *Kriteria lulusan: kreatif dan inovatif*
- 12. Selain peningkatan kualitas pembelajaran, kegiatan penelitian yang berkualitas juga merupakan hal yang penting untuk menuju peningkatan kemampuan daya saing bangsa. Institusi pendidikan tinggi yang didalamnya banyak terdapat sumberdaya manusia pada level magister dan doktor diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam melakukan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan nasional. *Penelitian sebagai ujung tombak pengembangan ilmu pengetahuan*
- 13. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi sekurang-kurangnya dari tiga sumber, yaitu pemerintah, melalui APBN yang dialokasikan untuk subsektor pendidikan tinggi; masyarakat, melalui pembayaran uang kuliah dan sumbangan lainnya; dan sektor produktif, melalui kerjasama masing-masing perguruan tinggi dengan sektor swasta, industri, dan sektor lain di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. *Pembiayaan pendidikan tinggi*
- 14. Dana operasional pendidikan tinggi yang tersedia masih jauh dari memadai, sehingga tidak memungkinkan pendidikan tinggi untuk bisa berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan daya saing bangsa. Sulit untuk bisa diharapkan memperbaiki kualitas pendidikan tinggi nasional yang sesuai dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kondusif bagi pengelolaan institusi pendidikan tinggi yang otonom.

perkembangan dinamika lingkungan global, apabila pendanaan yang tersedia masih relatif rendah. Di samping itu, institusi pendidikan tinggi masih memerlukan biaya investasi yang jauh lebih besar lagi untuk bisa meningkatkan akses dan pemerataan.

15. Mengacu pada keberhasilan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan dalam upaya meningkatkan daya saing bangsanya, perhatian yang tinggi dan konsisten terhadap dunia pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Fokus perhatian yang tinggi tersebut dapat dilihat dari jumlah dana yang besar yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.

16. Mengingat kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana pada sektor pendidikan masih sangat terbatas, filantropis, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lainnya dituntut untuk dapat berpartisipasi lebih aktif. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kontribusi pendanaan secara langsung ke perguruan tinggi melalui peningkatan kualitas laboratorium, peningkatan perpustakaan, pelatihan dosen, kerjasama penelitian, dan kegiatan layanan kepada masyarakat, dan lain-lain.

62

#### PENINGKATAN AKSES DAN PEMERATAAN UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI

17. Pendidikan tinggi selanjutnya dapat diakses oleh semua calon peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas. Kesamaan hak untuk memasuki perguruan tinggi bagi lulusan tersebut merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah, mengingat peningkatan kualitas pendidikan tinggi bagi masyarakat harus dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Pendidikan tinggi sudah selanjutnya dapat diakses bagi seluruh warga negara yang mempunyai kemampuan akademik yang memadai. Institusi pendidikan tinggi tidak melakukan diskriminasi dalam penerimaan mahasiswa.

*Akses dan pemerataan*

18. Institusi pendidikan tinggi dapat berfungsi sebagai salah satu bagian dari komponen masyarakat yang dapat menjadi perekat bangsa. Dalam rangka memperkuat proses integrasi nasional, maka pendidikan tinggi sudah selanjutnya dapat mengembangkan dan mengkaji berbagai kebijakan yang terkait dengan upaya mengembangkan budaya, dan integritas bangsa.

*Konservasi budaya*

Salah satunya dengan membangun pusat-pusat kajian yang spesifik terhadap keunikan lingkungan dimana institusi tersebut berada.

*Kondisi akses dan pemerataan*

19. Pada saat ini masih banyak ditemui penduduk berusia 19 - 24 yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai kemampuan akademis, tetapi tidak dapat menikmati status sebagai mahasiswa karena keterbatasan dana. Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah, angka partisipasi mahasiswa telah meningkat dari sekitar 9% pada tahun 1985 menjadi 13% pada tahun 2002. Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, angka partisipasi pendidikan tinggi tersebut masih tergolong rendah (Malaysia 23,26%; Philippines 29,45%; Thailand 31,92%).

*Kontribusi organisasi dan lembaga swadaya masyarakat*

20. Banyak terdapat lembaga swadaya masyarakat yang telah memberikan perhatian tinggi terhadap dunia pendidikan. Berbagai lembaga ini diharapkan dapat memberikan peran yang lebih tinggi lagi, khususnya dalam penyediaan dana bagi masyarakat yang kurang mampu, tetapi mempunyai kemampuan akademik yang memadai. Partisipasi aktif dari lembaga-lembaga seperti ini diharapkan dapat lebih mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi mereka yang berada di daerah terpencil.

63

21. Pencanaan berbagai program beasiswa yang bekerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi akan bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang mengelola berbagai aspek kemasyarakatan di daerah. Beasiswa yang diberikan diharapkan dapat mencukupi biaya kebutuhan proses belajar mengajar dan juga sekaligus dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup mahasiswa. Filantropis, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi melalui program beasiswa tersebut.

#### PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI PENYANGGA MORAL BANGSA

*Moral bangsa*

22. Dunia pendidikan tinggi akan meningkatkan perannya sebagai salah satu komponen dalam kelompok masyarakat yang dapat memberikan "pressure" secara akademik untuk lebih meningkatkan perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah yang kurang mendapat perhatian tetapi sangat vital bagi bangsa Indonesia.

23. Globalisasi merupakan hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap budaya bangsa pada awal millennium ini. Berbagai upaya untuk melindungi masyarakat yang berbudaya Indonesia dan menjaga karakter bangsa dalam rangka mengantisipasi tatanan baru menjadi hal yang sangat diperlukan. Pendidikan tinggi merupakan salah satu komponen bangsa yang sangat penting dalam upaya mempertahankan karakter bangsa dari berbagai pengaruh globalisasi.

24. Institusi pendidikan tinggi merupakan institusi yang diharapkan dapat berperan dan berfungsi menjadi salah satu institusi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut, pendidikan tinggi perlu memperhatikan konteks pemahaman terhadap isu-isu nasional yang berkembang seperti masalah-masalah lingkungan, politik, dan sosial, dan lain-lain.

*Perguruan Tinggi sebagai intermediary antara LSM dan*

25. Sejak jaman penjajahan Belanda, peran kaum intelektual dan kalangan kampus telah terbukti dapat menjadi bagian dari perubahan sejarah kebangsaan. Gerakan moral yang dipicu oleh kalangan kampus telah memberikan dampak perubahan secara keseluruhan. Perubahan besar di Indonesia dari era orde baru menuju era reformasi juga sangat dipengaruhi oleh gerakan moral yang dimulai dari kalangan perguruan tinggi.

*Peran yang telah dilakukan*

#### **PENINGKATAN KESEHATAN ORGANISASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI**

26. Organisasi pendidikan tinggi yang sehat merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkualitas. Pada level perguruan tinggi, kesehatan organisasi ditunjukkan dengan adanya kemampuan institusi untuk dapat melayani keinginan semua unit terkait dalam kerangka menuju visi dan misi institusi tersebut.

*Organisasi yang sehat*

27. Kita menyadari bahwa terjadi kesenjangan antar berbagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang dikaitkan dengan kesehatan organisasi. Institusi pendidikan tinggi yang telah maju, manajemen organisasinya lebih banyak tercurahkan pada peningkatan kualitas akademik. Sedangkan pada institusi pendidikan tinggi yang masih belum terlalu sehat atau belum terkoordinasi dengan baik, manajemen organisasinya lebih terfokus pada konsolidasi internal.

*Kontribusi organisasi dan lembaga swadaya masyarakat*

28. Organisasi dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan meningkatkan kesehatan organisasi perguruan tinggi melalui berbagai bentuk kerjasama. Salah satu bentuk kontribusi dimaksud adalah mengembangkan mekanisme kontrol masyarakat menuju terwujudnya akuntabilitas publik.

